



KOMDIGI

Laporan Kinerja 2024

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

i	Daftar Isi	i
	Ringkasan Eksekusif	iii
	Pengantar Kepala BBPPT	viii
01	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.3	Potensi dan Permasalahan Strategis	7
1.4	Sistematika Pelaporan	9
02	Perjanjian Kerja	11
2.1	Rencana Strategis tahun 2020 – 2024	13
2.2	Perjanjian kinerja Tahun 2024	14
03	Akuntabilitas Kinerja	15
3.2	Capaian Kinerja BBPPT	17
3.3	SASARAN KEGIATAN: Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK	21
A.	IKSK 1.1 Persentase (%) pengembangan sistem informasi pengujian perangkat TIK BBPPT Tapos	22
B.	IKSK 1.2 Persentase (%) pemenuhan prasarana laboratorium Pengujian alat/perangkat pengujian	26
B.	IKSK 1.3 Persentase pemenuhan standar mutu International Organization for Standardization (iso)	30
3.4	SASARAN KEGIATAN: Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK	35
A.	IKSK 2.1 Persentase (%) penyelesaian pengujian	36
B.	IKSK 2.2 Presentase (%) penyelesaian kalibrasi alat ukur	43
C.	IKSK 2.3 Jumlah kerjasama yang terjalin dengan Laboratorium/organisasi pengujian Perangkat/institusi pendidikan/institusi lainnya	49
3.5	SASARAN KEGIATAN: Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK	51
A.	IKSK 3.1 Indeks Integritas Pelayanan Publik atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024	51
B.	IKSK 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024	54
C.	IKSK 3.3 Persentase (%) Pencapaian Target PNPB Biaya Pengujian dan Kalibrasi target yang ditetapkan Tahun 2024	59
3.6	SASARAN 4. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif	63
A.	IKSK 4.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024	63
B.	IKSK 4.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi	68
3.7	KINERJA LAINNYA	72
A.	BBPPT memperoleh penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tingkat Nasional	72
B.	BBPPT Melakukan Promosi Tingkat Nasional dalam Rangka Meningkatkan Branding dan Pengenalan Layanan	73
c.	BBPPT Melakukan Dukungan Riset Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kebermanfaatan	74
3.8	REALISASI ANGGARAN	75
04	Penutup	77

RINGKASAN EKSEKUSIF

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas perangkat telekomunikasi di Indonesia. BBPPT sebagai laboratorium uji yang telah diakui dan telah diresmikan oleh pemerintah, akan terus meningkatkan kinerja dalam menyediakan layanan pengujian yang akurat, cepat, dan efisien.

BBPPT telah melaksanakan berbagai langkah peningkatan kinerja, termasuk peningkatan fasilitas laboratorium, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional. Selain itu, BBPPT juga terus menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk memastikan bahwa pengujian yang dilakukan sesuai dengan standar internasional.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung kemajuan teknologi telekomunikasi, BBPPT telah melakukan berbagai langkah signifikan untuk meningkatkan kapasitas pengujian. Salah satunya adalah dengan memperbarui dan menambah fasilitas pengujian yang ada, termasuk pengadaan peralatan pengujian canggih yang mampu menguji perangkat-perangkat dengan teknologi

terkini. Peningkatan kapasitas pengujian ini juga berfokus pada efisiensi waktu pengujian dan peningkatan akurasi hasil uji.

Pada tahun 2024 terdapat penambahan layanan pengujian BBPPT yaitu layanan pengujian **Specific Absorption Rate (SAR)**, **Electromagnetic Compliance (EMC)** secara full compliance, dan Pengujian Laser Safety. Tujuan dari penambahan layanan pengujian ini untuk memberikan jaminan bahwa perangkat telekomunikasi yang diuji oleh BBPPT tidak hanya memenuhi standar teknis yang diperlukan, tetapi juga aman digunakan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan atau lingkungan.

BBPPT berkomitmen untuk mendukung inovasi, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kapasitasnya yang berperan dalam mendorong kemajuan teknologi telekomunikasi yang lebih baik, aman, dan berkualitas untuk menjadi Pusat Pengujian Perangkat TIK bertaraf Internasional.

Ringkasan pencapaian kinerja BBPPT diuraikan pada tabel dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio	1. Persentase (%) Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT Tapos	100%	100%
		2. Persentase (%) Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian	100%	100%
		3. Persentase (%) Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian	100%	100%
2.	Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian melalui Kerjasama sesuai Standar Internasional	1. Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi	96%	97.54%
		2. Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur	96%	100%
		3. Jumlah Kerjasama yang Terjalin dengan Laboratorium/Organisasi Pengujian Perangkat/Institusi Pendidikan/Institusi lainnya	3 Kerjasama	4 Kerjasama
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT	1. Indeks Integritas Pelayanan Publik Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024	>8,5	9.14
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024	>3,6	3.81
		3. Persentase (%) Pencapaian Target PNBP Biaya Pengujian dari target yang ditetapkan Tahun 2024	100% (Rp. 10.575.000.000)	345% (Rp.36.517.158.000)
4.	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif	1. Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024	87	85
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	90	100

Pada Sasaran Program I “Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio” terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja, berikut merupakan ringkasan pencapaian dari setiap indikator:

Persentase (%) Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT Tapos

Indikator kinerja sasaran strategis 1 sesuai target tahun 2024 adalah 100% dan realisasi capaian kinerja 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dengan terlaksananya pengembangan sistem informasi pengujian perangkat TIK BBPPT Tapos ruang lingkup otomatisasi penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) ***Electromagnetic Compatibility (EMC)***.

Persentase (%) Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian

Indikator kinerja sasaran strategis 2 sesuai target tahun 2024 adalah 100% dan realisasi capaian kinerja 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dengan terlaksananya kegiatan mobilisasi SAR dari Bintang ke BBPPT Tapos dalam rangka pemenuhan prasarana laboratorium pengujian.

Persentase Pemenuhan Standar Mutu International Organization for Standardization (ISO)

Indikator kinerja sasaran strategis 3 sesuai target tahun 2024 adalah 100% dan realisasi capaian kinerja 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dengan terlaksananya kegiatan reakreditasi dan penambahan ruang lingkup laboratorium pengujian dan kalibrasi ISO 17025, ISO 17043, dan resertifikasi ISO 37001..

Pada Sasaran Program II “Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian melalui Kerjasama sesuai Standar Internasional” terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja, berikut merupakan ringkasan pencapaian dari setiap indikator:

Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Indikator kinerja sasaran strategis 4 sesuai target tahun 2024 adalah 96% dan realisasi capaian kinerja 97.54% melebihi target dengan total permohonan kumulatif pengujian selama tahun 2024 adalah 1017 dan telah diterbitkan 992 laporan hasil uji.

Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur

Indikator kinerja sasaran strategis 5 sesuai target tahun 2024 adalah 96% dan realisasi capaian kinerja 100% melebihi target dengan total permohonan kumulatif kalibrasi alat ukur selama tahun 2024 adalah 238 dan telah diterbitkan 238 laporan hasil kalibrasi.

Jumlah Kerjasama yang Terjalin dengan Laboratorium/Organisasi Pengujian Perangkat/Institusi Pendidikan/Institusi lainnya

Indikator kinerja sasaran strategis 6 sesuai target tahun 2024 adalah terlaksananya 3 Kerjasama dan realisasi capaian kinerja telah terlaksana 4 kerjasama dimana melebihi target tahun 2024..

Pada Sasaran Program III “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT” terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja, berikut merupakan ringkasan pencapaian dari setiap indikator:

Indeks Integritas Pelayanan Publik Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024

Indikator kinerja sasaran strategis 7 sesuai target tahun 2024 adalah tercapainya integritas pelayanan publik pengujian perangkat TIK dengan nilai >8.5 dan realisasi capaian kinerja yang didapatkan dengan nilai 8.85 melebihi target tahun 2024.

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024

Indikator kinerja sasaran strategis 8 sesuai target tahun 2024 adalah tercapainya survey kepuasan masyarakat pelayanan pengujian perangkat TIK dengan nilai >3.6 dan realisasi capaian kinerja yang didapatkan dengan nilai 3.81 melebihi target tahun 2024.

Persentase (%) Pencapaian Target PNBP Biaya Pengujian dari Target yang ditetapkan Tahun 2024

Indikator kinerja sasaran strategis 9 sesuai target tahun 2024 adalah pendapatan PNBP biaya pengujian dengan nilai Rp. 10.575.000.000 dan realisasi capaian kinerja yang didapatkan adalah Rp.36.517.158.000 atau 345% dari target.

Pada Sasaran Program IV “Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja, berikut merupakan ringkasan pencapaian dari setiap indikator:

Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024

Indikator kinerja sasaran strategis 10 sesuai target tahun 2024 adalah 87, dimana nilai kinerja anggaran adalah nilai kinerja perencanaan yang ditambah dengan nilai pelaksanaan anggaran realisasi capaian kinerja tahun 2024 adalah 85 kurang dari target karena Variabel nilai Perencanaan adalah Efektifitas Perencanaan anggaran berbobot 75 dan Efisiensi berbobot 25 (SBK 10 dan Efektifitas SBK 15). Namun BBPPT belum menggunakan SBK di tahun 2024, sehingga untuk capaian maksimal dari nilai kinerja perencanaan anggaran yaitu bobot nya adalah 75 (capaian RO).

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Indikator kinerja sasaran strategis 11 sesuai target tahun 2024 adalah mendapatkan nilai kualitas atas pelaporan keuangan dengan nilai 90 dan realisasi capaian kinerja mendapatkan nilai 100 sehingga melebihi target yang ditentukan.

Pengantar Kepala BBPPT



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak rahmatNya kepada kita semua. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dengan baik.

Tahun 2024 merupakan tahapan akhir dari Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024, BBPPT telah menyelesaikan semua kegiatan Pengembangan Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK sesuai dengan yang tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024 yaitu pembangunan sistem informasi pengujian dan peningkatan SDM yang dicapai melalui pengembangan sistem informasi perangkat TIK BBPPT dan pemenuhan prasarana laboratorium pengujian alat/perangkat pengujian.

BBPPT sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan teknologi telekomunikasi. BBPPT senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan pengujian yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku dengan meningkatkan kapasitas dan fasilitas pengujian. BBPPT mencapai sebuah tonggak penting dalam sejarahnya dengan peresmian laboratorium yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 7 Mei 2024. Peresmian ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia serta memperkuat kapasitas pengujian perangkat telekomunikasi yang semakin berkembang sebagai peran BBPPT untuk mendukung transformasi digital nasional.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dalam laporan ini, dilaporkan hasil capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengujian, meningkatkan fasilitas pengujian, dan mendukung kemajuan teknologi telekomunikasi.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja yang telah dilakukan BBPPT pada tahun 2024, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Kami juga berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas pengujian dan sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan dibuatnya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan BBPPT dan kemajuan industri telekomunikasi di Indonesia.

Depok, Februari 2025

**Kepala Balai Besar Pengujian
Perangkat Telekomunikasi**

Syharuddin

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI



Bab 1 Pendahuluan





1.1 Latar Belakang

Peresmian Balai Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 7 Mei 2024 merupakan sebuah bukti nyata dari kolaborasi, inovasi, dan komitmen dalam mewujudkan visi untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. BBPPT hadir sebagai salah satu pilar utama dalam transformasi digital nasional.

BBPPT melalui pelayanan pengujian perangkat TIK, memiliki tugas dan fungsi sebagai visi dan misi untuk Indonesia Digital Tahun 2025. Pertama, BBPPT berperan strategis dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan negara dari perangkat-perangkat yang tidak sesuai dengan standar emisinya (*Protect*). Kedua, BBPPT dituntut untuk dapat menjalankan peran yang lebih signifikan sebagai gerbang arus masuk-keluar produk-produk TIK baik ekspor maupun impor (*Gate*). Ketiga, BBPPT dituntut untuk menjadi bagian dalam manajemen spektrum frekuensi nasional (*Spectrum Management*).

BBPPT senantiasa melakukan inovasi bisnis dan teknologi, salah satunya dengan menjalin kerjasama nasional dan internasional, menjajaki ***mutual recognition arrangement (MRA)*** antar negara, dan keikutserta-

an dan keanggotaan dalam organisasi-organisasi telekomunikasi internasional untuk meningkatkan posisi BBPPT sebagai laboratorium berkelas internasional yang *internationally-accepted* dan *internationally-recognized* dan sebagai Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK rujukan nasional.

Sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo tahun 2020 - 2024 persentase pengembangan laboratorium pusat pengujian perangkat TIK pada tahun 2022 dilakukan pembangunan gedung laboratorium (*parent building*) dan sarana pendukung dimana BBPPT telah memiliki gedung yang terletak di Tapos Depok, Jawa Barat. Pada tahun 2023 dilakukan konstruksi infrastruktur dan fasilitas laboratorium pengujian dan kalibrasi melalui pemenuhan alat ukur dan pendukung laboratorium BBPPT yang terdiri dari 6 *Chamber*, 5 *Shielded Room*, dan 7 Paket pengadaan alat ukur diantaranya; pengadaan alat ukur ***Specific Absorption Rate (SAR)***, pengadaan alat ukur Radio, *Safety*, dan Optik, pengadaan alat ukur ***Electromagnetic Compatibility (EMC)*** *Chamber* 10 meter, pengadaan alat ukur ***Electromagnetic Compatibility (EMC)*** *Chamber* 3 meter, pengadaan alat ukur ***Short Range Device (SRD)***, pengadaan alat ukur Antena Kalibrasi, dan pengadaan alat

ukur seluler. Pada tahun 2024 terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengujian dan Peningkatan SDM yang dicapai dengan Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT dan Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian.

Diharapkan BBPPT dapat menjadi lembaga yang berperan penting dalam pengembangan sektor telekomunikasi di Indonesia, memberikan layanan pengujian yang akurat, cepat, dan terpercaya, serta mendukung terciptanya ekosistem yang aman, handal, dan berdaya saing untuk terwujudnya BBPPT sebagai *Center of Excellence*.

Laporan Kinerja disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian kinerja BBPPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang berhubungan dengan visi dan misi. Melalui laporan kinerja dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.





1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas BBPPT

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) adalah **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** di lingkungan Direktorat Jenderal **Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI)** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen SDPPI serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal SDPPI dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



1. Penyusunan rencana dan program di lingkungan BBPPT;



3. Pelaksanaan analisa evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi;



2. Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/atau perangkat telekomunikasi;



4. Pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi, **electromagnetic compatibility (EMC)** dan Kalibrasi.

Peran dan Fungsi BBPPT

Melalui pelayanan pengujian perangkat TIK BBPPT mengemban 3 (tiga) tugas dan fungsi yang sangat fundamental dan krusial, demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia dalam bertelekomunikasi.



1. Protect

Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia dari ketidaksesuaian emisi perangkat yang berpotensi mengganggu dalam bentuk pemenuhan compliance (Kepatuhan) terhadap standar pengujian perangkat TIK;



2. Gate

Menjadi pintu gerbang keluar masuknya perangkat TIK di Indonesia untuk penjaminan mutu termasuk membantu industri dalam negeri untuk dapat bersaing dipasar global;



3. Spectrum Management

Menjadi bagian dari satu kesatuan manajemen spektrum frekuensi nasional yang menjamin interoperabilitas dan perlindungan dari interferensi antar pengguna perangkat untuk meningkatkan user experience.

Struktur Organisasi



Struktur organisasi BBPPT berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022, terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sistem dan data informasi, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan BBPPT ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1.3 Potensi dan Permasalahan Strategis

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) memiliki potensi yang sangat besar dalam mewujudkan cita-cita sebagai Laboratorium Pusat Pengujian Rujukan Berstandar Internasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten, terutama dalam bidang pengujian perangkat telekomunikasi. Melalui pengembangan SDM yang berkelanjutan, diharapkan BBPPT dapat memperluas cakupan layanan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisi sebagai lembaga yang berperan penting dalam mendukung perkembangan industri telekomunikasi, baik dalam negeri maupun internasional.

Lembaga ini telah terakreditasi ISO/IEC 17025 untuk kompetensi laboratorium pengujian dan ISO/IEC 17043 untuk penyelenggara uji profisiensi, yang menunjukkan bahwa laboratorium BBPPT telah memenuhi standar internasional dalam hal kompetensi pengujian dan kalibrasi. Selain itu, lembaga ini juga telah tersertifikasi ISO/IEC 37001 **Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)** yang menunjukkan komitmennya dalam sistem manajemen anti-penyuapan sebagai bentuk kredibilitas dan integritas lembaga.

Fasilitas yang dimiliki mencakup 12 laboratorium yang dilengkapi fasilitas laboratorium canggih, berstandar internasional, dan mampu mendukung pengujian perangkat telekomunikasi yang akurat, efisien, serta memiliki hasil pengujian dapat diterima secara internasional. Disamping itu, BBPPT merupakan satu-satunya laboratorium pengujian yang memiliki perangkat pengujian **Specific Absorption Rate (SAR)** yang berfungsi memastikan keamanan dan kualitas perangkat telekomunikasi yang beredar, yang diharapkan dapat menjadi pusat rujukan utama bagi industri telekomunikasi.

BBPPT merupakan satu-satunya penyelenggara uji profisiensi di bidang telekomunikasi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi. Melalui kegiatan ini, BBPPT membantu memastikan bahwa laboratorium pengujian di Indonesia dapat menghasilkan hasil yang akurat dan konsisten. Dengan menjadi satu-satunya penyelenggara uji profisiensi di bidang telekomunikasi dapat mendukung pengembangan industri telekomunikasi yang berkualitas dan terpercaya di Indonesia.



Adapun penghargaan yang telah diraih oleh BBPPT pada tahun 2024, yaitu dipilih sebagai core business yang mewakili pelayanan publik Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil menunjukkan kinerja pelayanan publik yang luar biasa dalam **Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)** tingkat nasional. Lembaga pengujian ini dianggap memiliki kinerja pelayanan publik yang secara konsisten mencerminkan penyelenggaraan pelayanan prima serta berhasil mendapatkan penghargaan 10 terbaik kelompok kementerian pada PEKPPP tahun 2024 dengan predikat “Pelayanan Prima”. Selain itu, BBPPT juga menerima piagam penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, yang menegaskan bahwa satuan kerja ini yang berhasil meraih predikat **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** tingkat nasional dan menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Dengan penghargaan ini diharapkan dapat membuat reputasi yang baik, yaitu sebagai lembaga yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Diharapkan dengan semua potensi ini dapat menjadikan BBPPT sebagai lembaga yang sangat berperan dalam memastikan industri telekomunikasi di Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan berkualitas tinggi, sehingga mampu mewujudkan cita-cita sebagai Laboratorium Pusat Pengujian Rujukan Berstandar Internasional.

Adapun Isu/Permasalahan Strategis di BBPPT yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kinerja unggulnya serta mendukung pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Berikut merupakan Isu/Permasalahan Strategis yang dihadapi, antara lain:

1. BBPPT menjadi Center of Excellence yang berperan serta dalam mendukung pengembangan ekosistem digital nasional yang berdaya saing dan inclusive serta mempercepat adopsi emerging technologies menuju kemandirian Indonesia dalam hal perangkat TIK;
2. Peningkatan peran kolaborasi dan kerjasama dalam rangka pengakuan Indonesia pada tata kelola perangkat digital di forum internasional dalam mendukung perumusan kebijakan yang efektif dalam melaksanakan transformasi digital khususnya di bidang konektivitas wilayah Indonesia kedaulatan bangsa (Sovereignty);
3. Mendukung transformasi digital dalam pengembangan industri, inovasi, dan rekayasa teknologi informasi dan komunikasi nasional;
4. Pengembangan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui sertifikasi dalam dan luar negeri;
5. Optimalisasi pelayanan dan kapasitas laboratorium pengujian.

1.4 Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja **Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)** disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan pencapaian BBPPT. Sistematika laporan ini disusun dengan mempertimbangkan pentingnya informasi yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja, tantangan, dan upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Penyusunan Laporan Kinerja BBPPT berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja INstansi Pemerintah.

Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Adapun format laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini dijelaskan capaian lain yang diperoleh sepanjang tahun 2024.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Bab 2 Perjanjian Kerja



PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 2 tahun 2021 tentang rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi secara garis besar pada periode 5 tahun tersebut yaitu menitikberatkan pada pengembangan laboratorium BBPPT sebagai laboratorium rujukan dan laboratorium pusat pengujian perangkat TIK, dimana tergambar dalam tahapan sasaran strategis BBPPT pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program/Indikator kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator kinerja Kegiatan		Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 01 – Meningkatnya Kualitas Layanan Bidang Sumber Daya Perangkat dan Infomatika							
IKK 1	Indeks Integritas pelayanan publik pengujian perangkat TIK	%	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengujian Perangkat TIK	%	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Sasaran Kegiatan 03 – Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menjadi Pusat Pengujian Perangkat TIK							
IKK 3	Pengembangan Laboratorium Pengujian Perangkat Telekomunikasi Rujukan Nasional	%	10	30	50	80	100
IKK 4	Persentase (%) Pemenuhan Standar Mutu Internasional Organization for Standardization (ISO)	%	20	40	60	80	100
IKK 5	Persentase (%) Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian	%	N/A	50	–	90	100
Sasaran Kegiatan 04 – Meningkatkan daya saing dan penguatan teknologi pengujian melalui kerjasama sesuai standar internasional							
IKK 6	Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi	%	95	95	95	95	95
IKK 7	Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur	%	95	95	95	95	95
IKK 8	Jumlah Kerjasama yang Terjalin dengan Laboratorium/Organisasi Pengujian Perangkat/Institusi Pendidikan/Institusi lainnya	Kerjasama	1	1	1	1	1

2.2 Perjanjian kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi pada tahun 2024 terdiri dari 4 sasaran strategis diantaranya 3 sasaran strategis dengan berfokus pada pengembangan BBPPT dalam bidang pengujian perangkat telekomunikasi dan 1 sasaran strategis terkait dukungan teknis pada Nilai Kinerja Anggaran, berikut merupakan Sasaran Strategis BBPPT :

1. Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK;
2. Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian melalui Kerjasama sesuai Standar Internasional;
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT;
4. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif.

Indikator tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Persentase (%) Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT Tapos dengan target tahun 2024 adalah 100% dan capaian target berupa pengembangan sistem informasi pengujian perangkat TIK BBPPT Tapos ruang lingkup otomatisasi penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) *Electromagnetic Compatibility*
2. Persentase (%) Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian dengan target tahun 2024 adalah 100% dan capaian terpenuhi dengan kegiatan mobilisasi laboratorium **Specific Absorption Rate (SAR)** dari Bintara ke BBPPT Tapos dalam rangka pemenuhan prasarana laboratorium pengujian;
3. Persentase Pemenuhan Standar Mutu **International Organization for Standardization (ISO)** dengan target tahun 2024 adalah 100%
4. Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi dengan target tahun 2024 adalah 96%
5. Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur dengan target tahun 2024 adalah 96%
6. Jumlah Kerjasama yang Terjalin dengan Laboratorium/Organisasi Pengujian Perangkat/Institusi pendidikan/institusi lainnya dengan target tahun 2024 adalah 3 kerjasama
7. Indeks Integritas Pelayanan Publik Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024 dengan target tahun 2024 adalah nilai >8.2
8. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024 dengan target dengan target tahun 2024 adalah nilai >3.6
9. Persentase (%) Pencapaian Target PNPB Biaya Pengujian dari target yang ditetapkan Tahun 2024 (Rp.10.575.000.000)
10. Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024 dengan target tahun 2024 adalah nilai 87
11. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan target tahun 2024 adalah nilai 90



Bab 3 Akuntabilitas Kinerja



Capaian Kinerja BBPPT

Pada tahun 2024, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) berhasil mencatat berbagai capaian signifikan yang memperlihatkan komitmen dan dedikasi BBPPT dalam mendukung pengembangan sektor telekomunikasi di Indonesia. BBPPT sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengujian dan kalibrasi, selalu memperkuat kapasitas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu untuk memenuhi standar regulasi dan kebutuhan industri.

Capaian kinerja BBPPT tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal kapasitas pengujian, kualitas pelayanan, serta kontribusi dalam mendukung perkembangan industri telekomunikasi nasional. BBPPT akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan dan siap menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang dalam mendukung perkembangan sektor telekomunikasi yang semakin berkembang.

BBPPT terus berupaya untuk memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran keberhasilan dalam pelaksanaan “Program dan Kegiatan” yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi BBPPT. Misi tersebut diupayakan secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui sebuah laporan kinerja selama tahun 2024. Berikut merupakan target dan capaian kinerja BBPPT yang telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPPT Tahun 2024:



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Capaian	%
1.	Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio	1. Persentase (%) Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT Tapos	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian melalui Kerjasama sesuai Standar Internasional	1. Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi	96%	97.54%	101.71%
		2. Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur	96%	100%	104.17%
		3. Jumlah Kerjasama yang Terjalin dengan Laboratorium/Organisasi Pengujian Perangkat/Institusi Pendidikan/Institusi lainnya	3 Kerjasama	4 Kerjasama	133.33%
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT	1. Indeks Integritas Pelayanan Publik Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024	>8,5	9.14	104.12%
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024	>3,6	3.81	127.00%
		3. Persentase (%) Pencapaian Target PNPB Biaya Pengujian dari target yang ditetapkan Tahun 2024	100% (Rp. 10.575.000.000)	345% (Rp. 36.517.158.000)	345%
4.	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif	1. Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024	87	85	97.70%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	90	100	111.11%

Sasaran Kegiatan 1 – Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi laboratorium pusat pengujian

Sasaran kegiatan ini memiliki 3 (tiga) indikator, yang terdiri dari “Persentase (%) Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT Tapos”, “Persentase (%) Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian” dan “Persentase Pemenuhan Standar Mutu **International Organization for Standardization (ISO)**”

Pengembangan sistem informasi pengujian perangkat TIK BBPPT Tapos pada tahun 2024 telah mencapai 100% dengan tahap pengembangan aplikasi meliputi proses mengidentifikasi kebutuhan proses, perancangan sistem informasi, pengembangan fungsi sistem informasi, pengujian kinerja serta peluncuran perangkat lunak untuk digunakan oleh pelanggan. Selain itu, sasaran berupa pemenuhan prasarana laboratorium pengujian alat/perangkat pengujian dan pemenuhan Standar Mutu **International Organization for Standardization (ISO)**, juga telah memenuhi target yaitu 100%. Pemenuhan prasarana standar mutu internasional telah 100% , meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 80%.

Sasaran Kegiatan 2 – Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian melalui Kerjasama sesuai Standar

Sasaran kegiatan ini memiliki 3 (tiga) indikator, yang terdiri dari “Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi”, “Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur”, dan “Jumlah Kerjasama yang Terjalin dengan Laboratorium/Organisasi Pengujian Perangkat/Institusi Pendidikan/Institusi lainnya”

Pengujian yang dilakukan oleh BBPPT dapat bersifat tangibel yang dilakukan di laboratorium BBPPT dan pengujian secara on site test, serta pengujian yang bersifat intangibel yaitu pengujian **Post Market Surveillance (PMS)**, pengujian **Electromagnetic Field (EMF)**, serta pengujian guna mendukung UMKM dan pendidikan di Indonesia. Realisasi pengujian yang dicapai adalah 97,54% yang melebihi target yaitu 96%. Selain itu, pengujian kalibrasi yang terealisasi 100% dibandingkan target sebesar 96%, dengan komposisi berupa UPT Balai Monitor sebesar 55,5%; internal sebesar 43,7% dan eksternal sebesar 0,8%. Peningkatan daya saing dan penguatan teknologi pengujian juga ditunjukkan dengan jumlah kerja sama yang dicapai selama 2024, yaitu 4 kerja sama dibandingkan dengan target 3 kerja sama.

Sasaran Kegiatan 3 – Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT

Sasaran kegiatan ini memiliki 3 (tiga) indikator, yang terdiri dari “Indeks Integritas Pelayanan Publik Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024”, “Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024”, dan “Persentase (%) Pencapaian Target PNBP Biaya Pengujian dari target yang ditetapkan Tahun 2024 (Rp. 10.575.000.000)”

Pengujian yang dilakukan oleh BBPPT dapat bersifat tangibel yang dilakukan di laboratorium BBPPT dan pengujian secara on site test, serta pengujian yang bersifat intangibel yaitu pengujian **Post Market Surveillance (PMS)**, pengujian **Electromagnetic Field (EMF)**, serta pengujian guna mendukung UMKM dan pendidikan di Indonesia. Realisasi pengujian yang dicapai adalah 97,54% yang melebihi target yaitu 96%. Selain itu, pengujian kalibrasi yang terealisasi 100% dibandingkan target sebesar 96%, dengan komposisi berupa UPT Balai Monitor sebesar 55,5%; internal sebesar 43,7% dan eksternal sebesar 0,8%. Peningkatan daya saing dan penguatan teknologi pengujian juga ditunjukkan dengan jumlah kerja sama yang dicapai selama 2024, yaitu 4 kerja sama dibandingkan dengan target 3 kerja sama.

Sasaran Kegiatan 4 – Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif

Sasaran kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator, yang terdiri dari “Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024” dan “Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)” target kinerja anggaran BBPPT tahun 2024 sebesar 87% namun capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024 adalah 85,13% yang masuk dalam kategori Baik yaitu terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (bobot 50%) sebesar 37,5 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (bobot 50%) sebesar 47,63. Nilai kualitas pelaporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) terdiri dari laporan Keuangan (CaLK) yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

SASARAN KEGIATAN 1



TERWUJUDNYA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MENJADI
LABORATORIUM PUSAT PENGUJIAN
PERANGKAT TIK

IKSK 1.1

PERSENTASE (%) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGUJIAN PERANGKAT TIK BBPPT TAPOS

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Capaian 2024	%
Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK	Persentase (%) Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT Tapos	100%	100%	100

Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan produk yang memenuhi standar **Electromagnetic Compatibility (EMC)** semakin meningkat. Standar EMC menjamin bahwa perangkat elektronik dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhannya tanpa mengganggu atau terganggu oleh gangguan elektromagnetik. Proses verifikasi EMC melibatkan pengujian berbagai aspek emisi dan imunitas perangkat, yang hasilnya dirangkum dalam Laporan Hasil Uji (LHU).

Proses pembuatan LHU yang efisien dan akurat menjadi kritis untuk mempercepat waktu pelayanan pengujian dan sertifikasi produk. Namun, pembuatan LHU sering kali melibatkan banyak proses manual yang memakan waktu, dari pengumpulan data uji hingga penyusunan laporan. Ini menimbulkan risiko kesalahan manusia dan tidak efisien. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengotomatisasi proses pembuatan LHU dalam pengujian EMC, untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi keseluruhan proses.

Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Integrasi Pembuatan LHU pada 10 Test System pengujian EMC sebagai berikut :

1. EMI - Radiated Emission
2. EMI - Conducted Emission
3. EMS - Conducted Susceptibility
4. EMS - EFT & Surge Test System
5. EMS - Voltage Dips
6. EMS - Magnetic Field Test System
7. EMS - Harmonic Flicker
8. EMI - Radiator Emission (Chamber 2)
9. EMC - Radiated Susceptibility
10. EMC - Radiated Spurious Emission

Aplikasi generator pembuatan LHU sistem integrasi alat ukur pengujian EMC BBPPT mencakup aplikasi yang mampu mengkonversi data dari masing-masing instrumen ke format LHU secara otomatis. Sistem terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Perangkat Telekomunikasi "SIMPEL" melalui API database, memungkinkan integrasi data dan akses fitur untuk tes EMC dan report generation. Selain "SIMPEL" aplikasi juga terhubung dengan API Temperature dan Humidity di setiap ruangan pengujian, dan memiliki database lokal untuk memudahkan pengisian data untuk laporan otomatis. Dengan fokus pada skalabilitas dan pengembangan lebih lanjut, sistem menyediakan source code dan mendukung otomatisasi untuk pengembangan lebih lanjut.

Berikut merupakan tahapan dari pekerjaan pengembangan Aplikasi Generator Pembuatan LHU Sistem Integrasi Alat Ukur Pengujian EMC BBPPT :

01. Requirement Gathering

Requirement Gathering merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan dari pihak yang terlibat (*Stakeholder*) dalam suatu proyek. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditentukan.

02. Design

Proses desain pada suatu sistem adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk merancang dan mengembangkan elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut, baik sistem perangkat lunak, *hardware*, dan lain sebagainya.

Proses desain ini mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan, pembuatan konsep, serta pembuatan dan implementasi solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna. desain tidak hanya mencakup tampilan visual, tetapi juga bagaimana setiap elemen dalam sistem saling berinteraksi, alur proses dan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. berikut beberapa proses desain yang diterapkan pada pembuatan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK:

Program Architecture

Arsitektur sistem bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien, dapat diandalkan, aman, dan mudah dipelihara, serta mempertimbangkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional (seperti kinerja, skalabilitas, dan keamanan).

Dalam pengembangan sistem informasi ini arsitektur sistem yang digunakan adalah **Event based State Machine (EBSM)** yang merupakan suatu model pemrograman atau desain sistem yang mengatur perubahan suatu sistem berdasarkan peristiwa yang terjadi, di dalam perangkat lunak menggunakan beberapa panel dan sub panel yang terintegrasi. Selain itu digunakan **Object Oriented Programming (OOP)** untuk database lokal dan pembuatan dokumen LHU dalam format DOCX dan PDF.

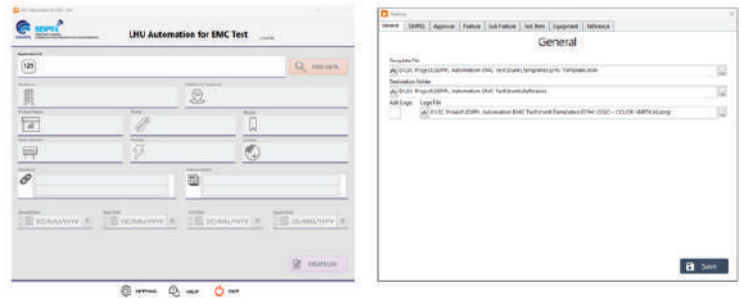
User Interface (Ui)

User Interface Design adalah proses merancang antarmuka pengguna dari suatu aplikasi atau sistem, yang berfokus pada penataan elemen-elemen visual dan interaktif agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif.

Berikut merupakan tampilan *user interface* dari *Main System*. Pada halaman ini akan digunakan sebagai input untuk

mengambil data pada SIMPEL dan data tersebut ditampilkan pada parameter-parameter yang sudah ditentukan untuk bisa dilakukan pengecekan oleh pengguna.

Pada sistem juga terdapat panel *Settings* yang akan digunakan sebagai pengaturan pada sistem. Pengguna bisa mengatur lokasi file dan folder yang dibutuhkan, mengatur konfigurasi SIMPEL, Approver, fitur-fitur dan *test item* pada *database* serta *equipment* yang nantinya akan digunakan sebagai referensi pada pembuatan LHU.



03. Development

Proses development pada suatu sistem adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mengembangkan, membangun, dan mengimplementasikan sistem tersebut setelah tahap desain selesai. Proses ini mencakup aktivitas mulai dari penulisan kode, integrasi komponen, pengujian, hingga penerapan sistem.

Development adalah inti dari pengembangan perangkat lunak atau sistem, di mana ide dan desain yang telah dirancang akan diwujudkan menjadi sistem yang dapat digunakan oleh pengguna.

Proses *development* pada pembuatan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK, diantaranya:

Data Extraction

Data extraction digunakan untuk mengelompokkan data-data yang didapatkan dari SIMPEL, kemudian disesuaikan dengan data yang terdapat pada *database* lokal. Data ini nantinya akan digunakan pada panel manual input di sistem, pengguna akan memilih parameter-parameter yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam LHU.

Data Request From SIMPEL

Sistem membutuhkan akses ke API SIMPEL sebagai referensi data pada pembuatan LHU. Pengguna akan menggunakan *Application ID* untuk mengambil data parameter dari SIMPEL. Data tersebut akan ditampilkan pada sistem dan pengguna dapat menyesuaikan kembali data-data tersebut sesuai

dengan kebutuhan pengguna dalam pembuatan LHU.

LHU membutuhkan data suhu dan kelembaban dari ruangan yang digunakan saat melakukan pengujian. Data tersebut didapatkan dari *API Web Services*, sama halnya dengan SIMPEL. Data suhu dan temperatur akan dihitung rata-rata dalam rentang waktu tertentu dan hasil perhitungannya dilampirkan pada LHU.

UHU Template

Template yang digunakan untuk pembuatan LHU adalah menggunakan format DOCX. Template ini memiliki format yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan LHU itu sendiri. Dalam proses pembuatan LHU, setiap data yang sudah didapatkan dari SIMPEL dan diatur pada sistem akan diinputkan secara otomatis ke dalam template sesuai dengan posisi dari sistem data dan lampiran yang digunakan. selain template LHU, terdapat template untuk *Static Files* dan *Test Limits*. Kedua *template folder* dari *template* tersebut sudah diatur untuk dapat diambil secara otomatis pada sistem sesuai dengan *test item* yang dipilih pada *manual input*.

Data Parsing to LHU

Data parsing merupakan proses memisahkan data antara pengujian EMI dan EMS. Sistem secara otomatis memisahkan data tersebut dalam LHU sesuai dengan *Test Item* pada data-base loka, apakah pengujian tersebut masuk ke dalam kriteria EMI atau EMS.

Post Data to SIMPEL

Setelah LHU berhasil di *generate* sistem akan mengirimkan LHU ke SIMPEL untuk dijadikan laporan hasil uji sesuai dengan fitur yang diujikan.

04. Testing

Testing merupakan proses untuk mengevaluasi kualitas, fungsi, dan kinerja perangkat lunak dengan tujuan untuk menemukan dan memperbaiki bug atau masalah sebelum perangkat lunak tersebut dirilis atau digunakan oleh pengguna. Proses ini melibatkan serangkaian teknik dan metode untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan harapan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

05. Delivery

Delivery merupakan proses pengiriman atau peluncuran perangkat lunak yang telah selesai dikembangkan dan diuji ke pengguna atau pelanggan akhir. Tujuan utama dari tahap *delivery* adalah memastikan bahwa perangkat lunak siap digunakan dan memberikan nilai kepada pengguna atau pelanggan sesuai dengan yang sudah ditentukan.

IKSK 1.2 PERSENTASE (%) PEMENUHAN PRASARANA LABORATORIUM PENGUJIAN ALAT/PERANGKAT PENGUJIAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Capaian 2024	%
Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK	Persentase (%) Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian	100%	100%	100

Sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi di Indonesia, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) secara konsisten mengembangkan prasarana dan fasilitas laboratorium pengujian. Pada tahun 2023 terdapat indikator terkait pengembangan fasilitas laboratorium yaitu IKS 1.1 Jumlah fasilitas *Chamber* dan *Shielded Room* yang diselesaikan dan IKS 1.2 Persentase (%) Pemenuhan Alat Ukur dan Pendukung Laboratorium pada 6 Laboratorium BBPPT Tapos. Sampai dengan akhir Desember tahun 2023 persentase capaian dari 2 indikator tersebut adalah 92.76% kurang dari target tahun 2023 100%, dimana terdapat sisa pekerjaan dari 2 indikator tersebut yang diselesaikan pada triwulan pertama tahun 2024, diantaranya:

1. Pengadaan alat ukur *Radio, Safety*, dan Optik penyelesaian pekerjaan pada tanggal 14 Maret 2024 dan target tercapai 100%
2. Pengadaan alat ukur *Electromagnetic Compatibility Chamber* 10 m penyelesaian pekerjaan pada tanggal 29 Januari 2024 dan target tercapai 100%
3. Pengadaan alat ukur *Electromagnetic Compatibility Chamber* 3m penyelesaian pekerjaan pada tanggal 14 Maret 2024 dan target tercapai 100%
4. Pengadaan alat ukur **Short Range Device (SRD)** penyelesaian pekerjaan pada tanggal 6 Januari 2024 dan target tercapai 100%
5. Pengadaan alat ukur Antena Kalibrasi penyelesaian pekerjaan pada tanggal 1 Maret 2024 dan target tercapai 100%



Dari sisa pekerjaan tahun 2023 yang telah diselesaikan pada tahun 2024, capaian sampai dengan akhir Desember 2023 adalah 92.76% telah tercapai 100% sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Indikator Persentase (%) Pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian merupakan kelanjutan dari indikator tahun 2023, indikator ini mengukur pemenuhan prasarana laboratorium yang ditingkatkan lebih lanjut melalui pemindahan laboratorium **Specific Absorption Rate (SAR)** dari laboratorium yang ada di Bintara, Bekasi ke Laboratorium BBPPT di Tapos, Depok dalam rangka meningkatkan kapasitas pengujian SAR.

Specific Absorption Rate (SAR) adalah jumlah energi frekuensi radio yang diserap oleh tubuh saat menggunakan perangkat nirkabel. Satuan dari nilai SAR adalah watts per kilogram (W/kg). Radiasi tinggi dapat menyebabkan pemanasan lokal di

jaringan tubuh, yang dapat mengubah struktur jaringan tubuh. Oleh karena itu, pengujian SAR sangat penting karena mengukur jumlah radiasi yang diserap oleh tubuh manusia, sesuai standar IEC/IEEE 62209-1528 (2020): SAR *Compliance* dan ICNIRP: 2020. Urgensi tersebut diwujudkan oleh BBPPT dengan menyediakan sistem pengujian SAR pertama di Asia Tenggara.

Balai Besar Pengujian Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) melaksanakan mobilisasi (pemindahan) sistem pengujian SAR dari laboratorium BBPPT di Bintara, Bekasi, Jawa Barat menuju ke laboratorium BBPPT di Tapos, Depok, Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk memusatkan pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi dapat dilaksanakan di laboratorium BBPPT di Tapos sehingga optimal dan efisien. Alur pelaksanaan mobilisasi sistem pengujian SAR tersebut dimulai dari persiapan awal pengadaan hingga serah terima hasil pekerjaan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan awal untuk pekerjaan mobilisasi	Januari 2024
2	Request for Information (RFI) pekerjaan mobilisasi	Februari 2024 s.d. Maret 2024
3	Persiapan dokumen pengadaan pekerjaan mobilisasi	Maret 2024 s.d. April 2024
4	Proses pengadaan	3 s.d. 17 Mei 2024
5	Pelaksanaan pekerjaan mobilisasi sistem pengujian SAR	20 Mei 2024 s.d. 15 Juli 2024
6	Serah terima hasil pekerjaan mobilisasi	15 Juli 2024

Pekerjaan mobilisasi ini dapat dilaksanakan sesuai surat perjanjian kontrak nomor 75/SPK-MSAR/BBPPT/5/2024 tanggal 20 Mei 2024. Berdasarkan kontrak tersebut BBPPT berkolaborasi dengan penyedia dan pabrikan alat ukur dalam melaksanakan mobilisasi ini. Dengan kerjasama yang baik, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat pada bulan Juli 2024, di mana target penyelesaian pekerjaan adalah di bulan Agustus 2024 (90 hari kalender). Tahapan pelaksanaan pekerjaan mobilisasi sistem pengujian SAR adalah sebagai berikut:

Pembongkaran (*dismantle*) sistem pengujian SAR

Pemeriksaan dan uji fungsi sistem pengujian SAR terlebih dahulu dilakukan oleh tim ahli pabrikan yang dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini didampingi oleh tim penyedia dan disaksikan oleh tim BBPPT. Pemeriksaan diawali dengan visual check untuk memastikan bahwa komponen sistem pengujian SAR dalam kondisi baik dan lengkap, dilanjutkan dengan *power on* untuk memastikan bahwa seluruh komponen tersebut dapat menyala dan berfungsi secara normal.

Uji fungsi dilakukan sistem pengujian SAR yang dilakukan antara lain pengujian 2G pada band 900MHz dan 1800MHz, pengujian 3G pada band 2100MHz, serta pengujian 4G pada band 850MHz, 900MHz, dan 1800MHz. Hasil pemeriksaan dan uji fungsi menunjukkan bahwa sistem pengujian SAR laboratorium BBPPT di Bintara dalam keadaan baik dan berfungsi normal sehingga pembongkaran sistem pengujian SAR dapat dilakukan.

Pengepakan semua komponen sistem pengujian SAR

Pengepakan komponen sistem pengujian SAR menggunakan boks karton yang sesuai dengan dimensi tiap komponen serta ditambahkan busa penahan maupun *bubble wrap*. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan komponen-komponen tersebut akibat guncangan saat perjalanan mobilisasi.

Proses pengiriman

Metode pengiriman adalah dengan menggunakan transportasi darat berupa truk boks supaya semua komponen sistem pengujian SAR aman dan terlindung dari cuaca buruk selama perjalanan dari laboratorium BBPPT di Bintara ke laboratorium BBPPT di Tapos. Setibanya di tujuan, boks-boks komponen sistem pengujian SAR segera dipindahkan menuju ke laboratorium SAR. Proses *loading* dan *unloading* tidak mengalami kendala, dan semua komponen sistem pengujian

ujian SAR dalam keadaan baik.

Pemasangan kembali (*reinstall*) sistem pengujian SAR

Reinstall sistem pengujian SAR yang telah dipindahkan ke laboratorium BBPPT di Tapos dilakukan oleh tim ahli dari pabrikan yang sebelumnya melakukan pembongkaran sistem tersebut, didampingi oleh tim penyedia dan disaksikan oleh tim BBPPT.

Test and commissioning

Test and commissioning sistem pengujian SAR dilakukan oleh tim ahli dari pabrikan yang didampingi oleh tim penyedia dan disaksikan oleh tim BBPPT. Proses ini terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

i. Visual check

Sama seperti saat tahapan *dismantle*, *visual check* bertujuan untuk memastikan bahwa komponen sistem pengujian SAR dalam kondisi baik dan lengkap setelah dimobilisasi dari laboratorium BBPPT di Bintara ke laboratorium BBPPT di Tapos.

ii. Power on

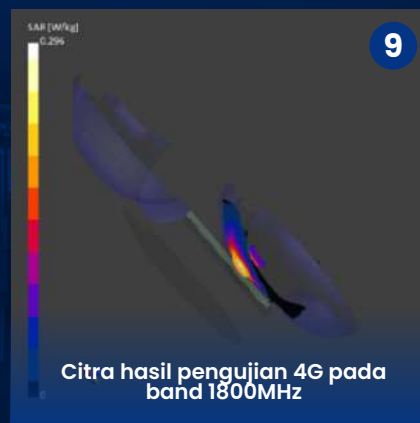
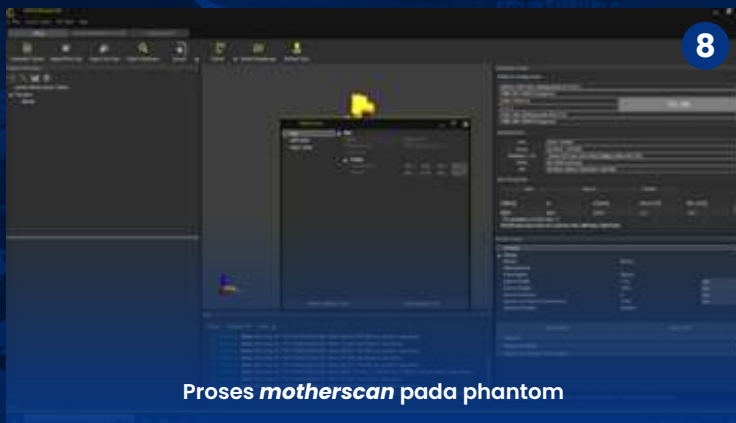
Sistem pengujian SAR dipastikan dapat menyala/*on* dan dapat berfungsi normal.

iii. Motherscan pada SAM phantom dan ELI phantom

Motherscan berfungsi untuk mewujudkan representasi virtual posisi phantom agar tertampil pada perangkat lunak pengujian SAR di PC SAR System dengan mengukur detail geometris di seluruh area yang dapat diukur sesuai bentuk dan permukaan phantom tersebut.

iv. Pengujian 2G pada band 900MHz dan 1800MHz, 3G pada band 2100 MHz, dan 4G pada band 850MHz, 900MHz, dan 1800MHz

Hasil *test and commissioning* menunjukkan bahwa sistem pengujian SAR laboratorium BBPPT di Tapos dalam keadaan baik dan berfungsi normal setelah proses mobilisasi dari Bintara.



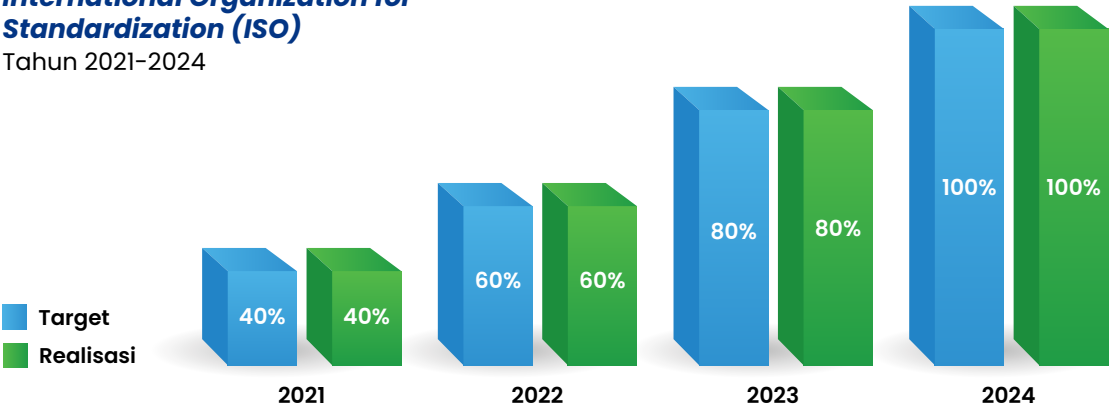
IKSK 1.3

PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR MUTU *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2024	Realisasi	%
Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK	Persentase Pemenuhan Standar <i>Mutu International Organization for Standardization (ISO)</i>	100%	100%	100

Persentase Pemenuhan Standar Mutu *International Organization for Standardization (ISO)*

Tahun 2021-2024



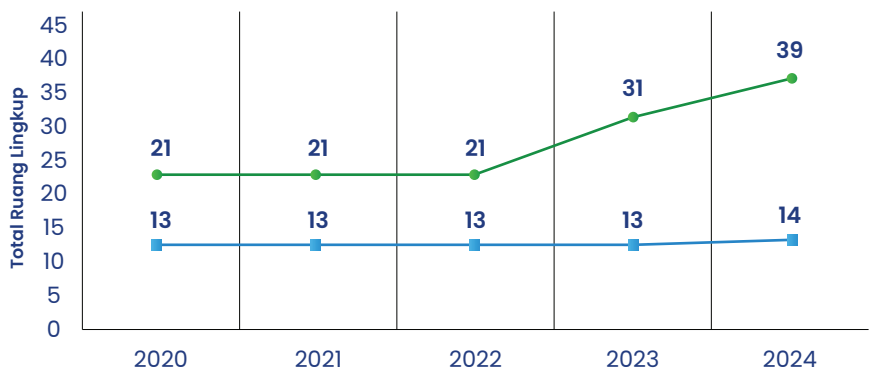
Pemenuhan Standar Mutu *International Organization for Standardization (ISO) 17025*

ISO/IEC 17025:2017 adalah standar internasional yang mengatur persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Standar ini mencakup berbagai aspek penting yang harus dipenuhi oleh laboratorium agar dapat beroperasi dengan kualitas yang diakui secara global.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) berhasil mempertahankan akreditasi ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian (LP-112-IDN) dan Laboratorium Kalibrasi (LK-137-IDN) setelah melalui proses asesmen reakreditasi yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pelaksanaan reakreditasi dilakukan bersamaan dengan penambahan 12 ruang lingkup pengujian dan 1 (satu) ruang lingkup kalibrasi. Dengan tambahan ruang lingkup tersebut, total ruang lingkup pengujian di BBPPT kini mencapai 39, sementara ruang lingkup kalibrasi mencapai 14. Penambahan ruang lingkup menunjukkan peningkatan kapasitas laboratorium BBPPT dalam melakukan pengujian dan kalibrasi yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan industri telekomunikasi yang terus berkembang.

Ruang Lingkup Pengujian Tahun 2020-2024

- Lab Pengujian
- Lab Kalibrasi



Masa akreditasi yang diberikan oleh KAN berlaku selama 5 (lima) tahun, akreditasi laboratorium pengujian berlaku dari 11 Desember 2024 hingga 17 November 2029, dan laboratorium kalibrasi berlaku dari 23 Oktober 2024 hingga 3 Oktober 2029.



Gambar 2. Sertifikat Akreditasi Lab Pengujian (LLP-112-IDN) dan Lab Kalibrasi (LK-137-IDN)

Sebelum dilakukan pelaksanaan reakreditasi oleh KAN, sebelumnya BBPPT telah menjalani asesmen Surveilans Tidak Terjadwal (STT) oleh KAN dalam rangka pemutakhiran metode pengujian *EMC Conducted dan Radiated Emission*, yang merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas dan ketepatan pengujian perangkat telekomunikasi. Proses pemutakhiran tersebut memastikan bahwa BBPPT tetap mengikuti perkembangan teknologi dan standar internasional yang relevan.

Pengujian *EMC Conducted dan Radiated Emission* yang dilakukan oleh BBPPT telah memenuhi persyaratan untuk menjadi ruang lingkup baru dalam penilaian kesesuaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika selaku instansi yang memiliki kewenangan menetapkan Balai Uji Dalam Negeri (BUDN). Sertifikat BUDN BBPPT berlaku selama 3 (tiga) tahun, yaitu sejak 26 Mei 2023 hingga 25 Mei 2026.

Selain dilakukan asesmen oleh lembaga eksternal, dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) laboratorium, BBPPT juga melaksanakan audit internal ISO 17025. Audit internal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan dokumen mutu, sehingga lebih terstruktur dan efisien.

Pelaksanaan kegiatan tinjauan manajemen ISO 17025 dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu di laboratorium berjalan sesuai dengan standar yang berlaku, menilai efektivitas dan kesesuaian prosedur yang diterapkan, evaluasi terhadap pencapaian tujuan mutu, hasil audit internal, serta tindak lanjut terhadap temuan dan perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, tinjauan juga mencakup identifikasi risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kinerja laboratorium.

Sesuai klausul 7.7 ISO 17025 tentang pemastian keabsahan hasil, laboratorium harus memantau kinerjanya dengan membandingkannya dengan hasil laboratorium lain melalui partisipasi dalam uji profisiensi atau partisipasi dalam perbandingan antar laboratorium selain uji profisiensi. Sepanjang tahun 2024, laboratorium pengujian dan kalibrasi di BBPPT telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memastikan keabsahan hasil pengujian melalui uji profisiensi dan uji banding. Uji profisiensi dilakukan untuk ruang lingkup laboratorium kalibrasi yang mencakup multimeter dan osiloskop, serta untuk laboratorium pengujian dengan mengikuti uji profisiensi pada *subscriber* LTE. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan konsistensi hasil pengujian yang dilakukan oleh BBPPT.

Selain uji profisiensi, BBPPT juga aktif melaksanakan uji banding antar laboratorium dalam negeri. Kegiatan uji banding ini mencakup beragam ruang lingkup, di antaranya pesawat telepon analog, *repeater* GSM WCDMA, *router*, pesawat telepon GSM, radio maritim, *laser safety*, *electrical safety*, dan *SRD conducted*. Uji banding ini menjadi sarana penting dalam meningkatkan akurasi dan kualitas hasil pengujian yang dihasilkan oleh

BBPPT, serta untuk memastikan bahwa laboratorium-laboratorium di Indonesia memiliki keseragaman standar yang tinggi.

BBPPT juga melakukan uji banding dengan laboratorium-laboratorium luar negeri guna memperluas pengakuan dan standar global. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas laboratorium, tetapi juga memperkuat posisi BBPPT di kancah internasional dalam hal kompetensi dan kualitas pengujian. Uji banding luar negeri dilaksanakan untuk beberapa ruang lingkup sebagai berikut:

- **Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T)** bersama **Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)**
- **Specific Absorption Rate (SAR)** dengan **Shenzhen Balun Technology China**
- **Low Power Wide Area (LPWA)** dengan **China Telecommunication Technology Labs (CTTL)**.

Rekognisi internasional untuk laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi menunjukkan bahwa laboratorium tersebut memenuhi standar global dalam hal kualitas, akurasi, dan keandalan pengujian. Pengakuan ini memungkinkan hasil pengujian untuk diterima di pasar internasional, memastikan perangkat telekomunikasi memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang diakui di berbagai negara.

BBPPT (LP-112-IDN) berhasil meraih pengakuan internasional dengan telah terdaftar dalam database laboratorium pengujian yang terekognisi International Telecommunication Union (ITU) sesuai ITU-T Guideline “Testing Laboratories Recognition Procedure” dengan ruang lingkup akreditasi (ITU-T Recommendation) K.116 tentang Electromagnetic compatibility requirements and test methods for radio telecommunication terminal equipment.

Selain itu, BBPPT berhasil memperluas jaringan kolaborasi internasional dengan bergabung sebagai anggota dalam dua organisasi terkemuka, yakni **Global Certification Forum (GCF)** dan **Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA)**. Keanggotaan ini membuka peluang untuk terlibat dalam

pengembangan standar global untuk sertifikasi perangkat telekomunikasi. Tahun 2025 BBPPT berencana untuk mendapatkan rekognisi dari **Federal Communications Commission (FCC)** untuk memperluas cakupan akreditasi internasional.

Pemenuhan Standar Mutu *International Organization for Standardization (ISO)* 17043

ISO/IEC 17043 merupakan standar internasional yang mengatur tentang persyaratan umum untuk Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP). Uji profisiensi merupakan suatu proses untuk mengevaluasi kemampuan laboratorium atau lembaga pengujian dalam mengukur dan menguji parameter tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. Standar ini berfokus pada aspek kompetensi penyelenggara uji profisiensi dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipercaya.

Dalam rangka mempertahankan akreditasi ISO 17043 yang diperoleh sejak tahun 2021, pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan surveilans, penyaksian asesmen/ witness dan asesmen penambahan 1 (satu) ruang lingkup yaitu Pesawat Telepon Seluler WCDMA sehingga total ruang lingkup PUP saat ini adalah 4 (empat) ruang lingkup.



No.	Ruang Lingkup
1	Wireless LAN
2	Bluetooth
3	Perangkat Radio Komunikasi 2 arah (HF, VHF dan UHF dengan daya < 5 Watt)
4	Pesawat Telepon Seluler WCDMA



Pemenuhan Standar Mutu *International Organization for Standardization (ISO) 37001*

ISO 37001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk membangun, mengimplementasikan, memelihara, dan memperbaiki sistem manajemen anti penyuapan dalam organisasi. Tujuan dari ISO 37001 adalah untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Kominfo berhasil meraih sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak Tahun 2021. Tahun 2024 telah dilakukan asesmen oleh lembaga sertifikasi untuk mempertahankan ISO 37001. Proses resertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen anti penyuapan yang diterapkan tetap relevan. Masa sertifikasi ISO 37001 berlaku selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak 23 September 2024 hingga 27 November 2027 untuk ruang lingkup *Comprehensive ICT & Digital Device Testing And Calibration Services*, dengan demikian seluruh kegiatan terkait pengujian dan kalibrasi di BBPPT harus menjalankan sistem manajemen anti penyuapan yang sesuai dengan standar ISO 37001.

SASARAN KEGIATAN 2



**MENINGKATKAN DAYA SAING DAN
PENGUATAN TEKNOLOGI PENGUJIAN
MELALUI KERJASAMA SESUAI STANDAR
INTERNASIONAL**

IKSK 2.1

PERSENTASE (%) PENYELESAIAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran. Persyaratan teknis tersebut merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal terhadap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dengan memperhatikan aspek listrik/elektronis, Lingkungan, keselamatan/ keamanan, dan kesehatan. Apabila Menteri atau Direktur Jenderal belum mengatur persyaratan teknis, pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dapat mengacu pada standar internasional atau standar lainnya.

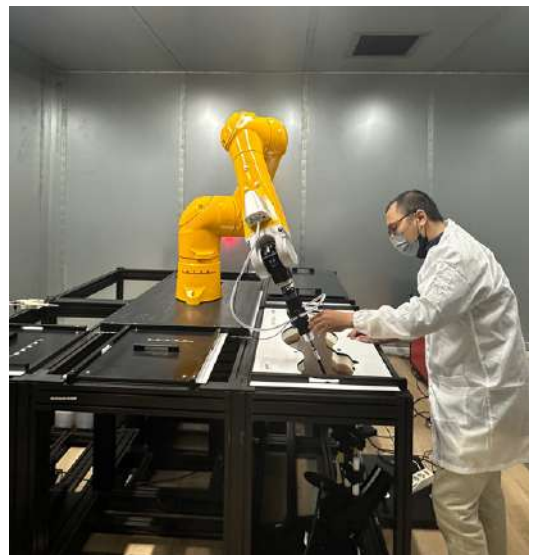
Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, BBPPT melakukan proses Pengujian yang menjadi *core* utama dalam memainkan peran sebagai *Protek*, *Gate* dan *Spectrum management*.

BBPPT melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2017 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat

telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (*Technical Specification Regulation*), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Sebagai indikator utama dalam menunjang proses pengujian, BBPPT memastikan Persentase (%) Penyelesaian pengujian perangkat telekomunikasi dengan menargetkan Jumlah Laporan Hasil Uji dibandingkan Jumlah Permohonan Pengujian dengan menggunakan pengali 100% pada tahun berjalan.

Dalam hal ini capaian 100% diartikan terselesaikannya jumlah permohonan pengujian yang masuk dibandingkan dengan jumlah penerbitan laporan hasil uji.



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2024	Realisasi	%
Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian melalui Kerjasama sesuai Standart Internasional	Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi	96 %	97.54%	101.60%



Latar Belakang, Maksud dan Tujuan.

Pengujian merupakan salah satu bentuk komitmen nyata dari BBPPT keberadaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk itu BBPPT telah melakukan dan mengembangkan beberapa jenis pengujian sehingga dapat memainkan perannya sebagai *Protect, Gate dan Spectrum Management*. Maksud dari kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi yang dilakukan oleh BBPPT adalah untuk menjamin bahwa setiap perangkat yang akan digunakan dalam jaringan telekomunikasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan melakukan pengujian ini, BBPPT bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis, keamanan, dan kompatibilitas yang mungkin muncul dalam penggunaan sehari-hari. Pada tahun 2024 BBPPT semakin meningkatkan perannya, khususnya dalam bidang Pengujian Perangkat Telekomunikasi dengan memberikan dampak secara tangible dan intangible bagi Indonesia.

1. Pengujian tangible.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi melakukan pengujian secara reguler dan komersial berdasarkan ruang lingkup yang telah di daftarkan dan terakreditasi dengan lingkup pengujian antara lain:

• Pengujian dilakukan di Laboratorium BBPPT

BBPPT secara reguler membuka pelayanan pengujian yang dilakukan di Laboratorium yang dimiliki oleh BBPPT pada tahun 2024, Diantaranya adalah Laboratorium Radio Frekuensi, Laboratorium EMC, Laboratorium Broadcast, Laboratorium *Electrical Safety*, Laboratorium *Laser Safety* dan Laboratorium SAR.

• Pengujian secara *On Site Test*

Selain melakukan pengujian reguler yang dilakukan di Laboratorium, BBPPT juga melakukan pengujian secara in situ atau yang di sebut dengan *On Site Test*, Dimana hal tersebut dilakukan jika keadaan alat dan perangkat yang akan di uji tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian di Laboratorium yang dimiliki oleh BBPPT.

2. Pengujian intangible

Selain melakukan Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang bersifat *tangible*, pada tahun 2024 BBPPT melakukan pengu-

jian yang sifatnya intangible namun dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh Masyarakat Indonesia hal tersebut merupakan komitmen BBPPT dalam mendukung Rencana Strategis Ditjen SDPPI Tahun 2020–2024 seperti:

- **Pengujian PMS (*Post Market Surveillance*)**

Post Market Surveillance merupakan Program dari salah satu tim Kerja yang berada di bawah naungan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, guna memastikan perangkat yang telah tersertifikasi dan beredar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna Perangkat Telekomunikasi di Indonesia.

- **Pengujian EMF (*Electromagnetic Field*)**

Pengujian EMF ini dilakukan Bersama dengan Direktorat Standardisasi PPI guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada Masyarakat Indonesia terhadap paparan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh pemancar radio atau BTS selluer.

- **Pengujian guna mendukung UMKM di Indonesia.**

Pada tahun 2024, BBPPT juga melakukan beberapa macam pengujian guna mendukung UMKM di Indonesia yang diawali dengan PKS yang telah dilakukan sebelumnya oleh BBPPT dengan UMKM tersebut.

- **Pengujian untuk mendukung Pendidikan di Indonesia.**

Sebagai bentuk dukungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terhadap Pendidikan di Indonesia dengan jalan memberikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBPPT untuk mendukung Pendidikan yang ada di Indonesia.





Sasaran Kegiatan

Sasaran pengujian di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi pada tahun 2024, telah terpenuhi dimana didasarkan pada jumlah pengujian yang masuk dan juga jumlah pengujian yang telah diselesaikan dalam pengujian regular yang sifatnya tangiabel. Sesuai target di Perjanjian kinerja sebesar 96 % pada tahun 2024.

Disamping itu terdapat beberapa sasaran diluar pengujian regular yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yaitu pengujian yang sifatnya intangiabel yang dapat menambah nilai dari BBPPT pada tahun 2024 khususnya dalam bidang Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang menjadi core bisnis dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.



Capaian Target

Secara perhitungan target pencapaiannya adalah Persentase (%) dari jumlah Permohonan Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang masuk di dibandingkan dengan Jumlah Penerbitan LHU pada tahun 2024, dengan melakukan akumulasi secara kumulatif pada setiap bulan di tahun berjalan. Berikut merupakan tabel pencapaian hingga desember 2024.

Tabel 1. Detail Jumlah dan Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi tahun berjalan.

No	Bulan Masuk	Terbit Permohonan	LHU	Cum Permohonan	Cum LHU	Selisih (E-F)	Persentase %
1	Januari	45	16	45	16	29	35.56
2	Februari	54	54	99	70	29	70.71
3	Maret	78	77	177	147	30	83.65
4	April	76	62	253	209	44	82.61
5	Mei	80	61	333	270	63	81.08
6	Juni	56	67	389	337	52	86.63
7	Juli	110	93	499	430	69	86.17
8	Agustus	125	116	624	546	78	87.50
9	September	97	81	721	627	94	86.96
10	Oktober	95	115	816	742	74	90.93
11	Nopember	97	112	913	854	59	93.54
12	Desember	69	133	982	987	-5	100.51

Jumlah permohonan yang masuk pada tahun 2024 adalah sebanyak 982 aplikasi. Hingga Desember 2024 penyelesaian proses pengujian mencapai 987 aplikasi. Dengan jumlah persentase penyelesaian adalah 100.51 % dari target 96% Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi tahun berjalan. Perbandingan penyelesaian dari tahun 2021 sampai 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
95	95.51	95	96.84	95	98.64	96	100.51



Analisa Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berikut merupakan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi sehingga mencapai target 100.51% dari target 96% di tahun 2024 ialah:

- Kesesuaian pembagian penugas pengujian tugas pengujian berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh tiap personel pengujian di BBPPT, yang dimana juga di dukung dengan program pelatihan yang diberikan guna menambah pengetahuan baru dalam bidang Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
- Pengimplementasian inovasi metode yang dilakukan sehingga proses pengujian yang dilakukan lebih cepat, tepat dan sesuai dengan standart yang sesuai
- Penggunaan Alat dan Perangkat Pengujian yang efisien serta dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan kepresisian dalam melakukan proses Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
- Melakukan kegiatan pengujian ekstra di luar jam kerja personel pengujian di BBPPT

Efisiensi Penggunaan sumber daya.

Dalam Upaya pemenuhan pencapaian keberhasilan kinerja mengalami beberapa permasalahan seperti, Perbedaan beban kerja setiap personel Laboratorium yang dikarenakan beberapa perbedaan kompetensi setiap personel di Laboratorium, kemudian keterbatasan jumlah peralatan pengujian pada tahun 2024 serta perbedaan kesibukan dari masing-masing personel laboratorium yang berbeda-beda. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja maka dilakukan beberapa efisiensi penggunaan sumber

- **Optimalisasi sarana pengujian yang dimiliki oleh BBPPT.**
- **Melakukan Optimalisasi dan otomatisasi beberapa proses pengujian.**
- **Penggunaan Alat Pengujian yang Tepat.**

- Pembagian kerja setiap personel Laboratorium secara efisien dengan memperhatikan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan Klasterisasi pengujian berdasarkan waktu penyelesaian pengujian dengan tetap memperhatikan kualitas pengujian.
- Pengembangan metode pengujian baru yang dapat dipertanggung jawabkan



Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi pada tahun 2024 telah mencapai target 100.51 % dari target yang diharapkan adalah 96 %, dengan menyelesaikan 487 Laporan Hasil Uji dibandingkan dengan 482 Jumlah permohonan yang masuk dimana terdapat 6 yang tidak terselesaikan di tahun 2023 dikarenakan permohonan tersebut akan terselesaikan di tahun 2024. Keberhasilan pencapaian melebihi target di tahun 2024 dikarenakan keberhasilan dalam efisiensi proses pengujian dengan tetap memperhatikan kualitas dan waktu pengujian juga dengan terus dilakukannya pengembangan kompetensi setiap personel Laboratorium di BBPPT.



Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Sasaran dan Indikator Tersebut

Berikut merupakan Upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran dan target dari indikator ini adalah dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Melakukan inovasi metode pengujian
2. Melakukan pembagian beban kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap personel laboratorium di BBPPT.
3. Melakukan rapat Intens antar personel di Laboratorium guna mengetahui setiap kebutuhan dari setiap Laboratorium.
4. Melakukan *refreshment* atau *training* tentang pengetahuan teori pengujian maupun penggunaan alat ukur, baik antar personel Laboratorium atau dengan mendatangkan narasumber berdasarkan keahlian yang dibutuhkan.
5. Melakukan maintenance peralatan dan update Instruksi Kerja di Laboratorium secara berkala.
6. Memastikan kondisi Laboratorium sesuai dengan yang dipersyaratkan pada ISO 17025 setiap melakukan proses pengujian.
7. Melakukan efisiensi dalam melakukan proses pengujian dengan memperhatikan kualitas dan waktu pengujian.



IKSK 2.2

PRESENTASE (%)

PENYELESAIAN KALIBRASI ALAT UKUR

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Capaian 2024	%
Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian melalui Kerjasama sesuai Standar Internasional	Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi instrumen pengukuran	96 %	100%	101.98%

Untuk menjamin mutu pengujian dan kompetensi laboratorium yang lebih baik, BBPPT telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2017 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001. Sesuai pedoman ISO-17025:2017, klausul 5.6 tentang ketertelusuran pengukuran menyatakan bahwa laboratorium harus mempunyai program dan prosedur yang ditetapkan untuk kalibrasi peralatannya.

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan nilai benar dari instrumen pengukuran dengan cara membandingkan terhadap standar ukur (yang kemudian disebut sebagai kalibrator) yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.

Proses kalibrasi bisa diilustrasikan dengan gambar dibawah. Dimana sebuah pembangkit sinyal membangkitkan sinyal dengan frekuensi 1,000,000,000 GHz, namun oleh penerima sinyal terbaca 999,999,969 MHz yang artinya terdapat nilai koreksi sebesar 0.000031 MHz. Pembangkit sinyal ini dianggap mempunyai nilai yang benar karena telah dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain yang memiliki level lebih tinggi. Sehingga penting untuk memiliki sertifikat kalibrasi yang sah dan terkini untuk memastikan bahwa perangkat atau instrumen pengukuran yang digunakan memberikan hasil yang akurat.

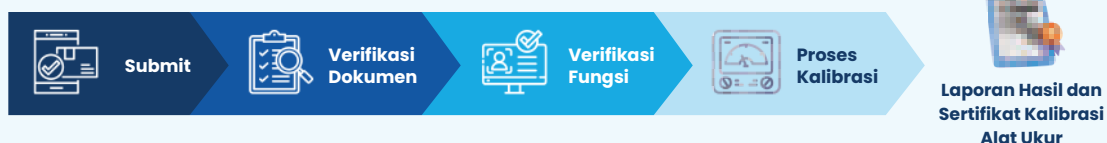




Ilustrasi Proses Kalibrasi

Melihat betapa pentingnya kalibrasi dan dalam rangka mendukung penerapan klausul 5.6 tersebut, BBPPT memiliki laboratorium kalibrasi yang bertujuan untuk melakukan kalibrasi terhadap instrumen pengukuran internal direktorat SDPPI yakni laboratorium pengujian BBPPT dan UPT Balai Monitor seluruh Indonesia, serta instrumen pengukuran dari luar SDPPI. Laboratorium kalibrasi BBPPT telah mendapatkan Akreditasi dari KAN sejak tanggal 23 Juni 2011 dengan nomor akreditasi LK-137-IDN.

Kalibrasi Alat Ukur



Tahapan Alur Kalibrasi BBPPT

Kalibrasi pada BBPPT memiliki tahapan alur seperti pada gambar diatas. Aplikasi melakukan *submit* permohonan kalibrasi pada SIMPEL, kemudian petugas loket akan memastikan bahwa dokumen kelengkapan telah sesuai untuk kemudian dijadwalkan verifikasi fungsi yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa peralatan ukur milik aplikasi berfungsi dengan baik. Jika semua proses tersebut telah dilakukan dan hasilnya baik, peralatan ukur akan disimpan di Gudang BBPPT untuk kemudian dilakukan proses kalibrasi pada laboratorium kalibrasi sesuai antrean. Keluaran dari serangkaian proses kalibrasi berupa sertifikat kalibrasi yang berisi nilai penyimpangan dari instrumen pengukuran beserta nilai ketidakpastian pengukuran.



Manfaat dan Dampak Kalibrasi

Kalibrasi yang dilakukan pada alat ukur memastikan bahwa hasil ukur yang ditampilkan pada alat ukur dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal kalibrasi alat ukur milik laboratorium pengujian, kalibrasi memastikan bahwa hasil pengujian berupa *pass/fail* dapat dipercaya, hal ini penting karena hasil pengujian akan menjadi dasar untuk diperbolehkan atau tidaknya sebuah alat telekomunikasi untuk beredar di masyarakat. Sedangkan dalam hal kalibrasi alat ukur milik UPT Balai Monitor, kalibrasi memastikan bahwa hasil *monitoring* yang dilakukan oleh UPT dapat dipertanggungjawabkan, hal ini penting karena hasil monitoring akan menjadi dasar hukum untuk menindak pengguna frekuensi yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan. Kalibrasi juga menjadi hal penting bagi laboratorium kalibrasi sehingga dapat memastikan hasil kalibrasi dari alat ukur

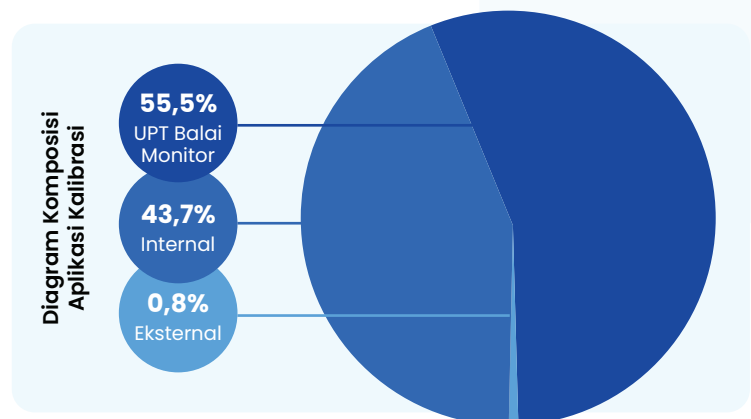
milik lembaga-lembaga yang dilayani tertelusur dengan standar ukur yang lebih tinggi. Dengan kata lain, dilakukan tidaknya kalibrasi pada alat ukur sebuah lembaga akan sangat berpengaruh bagi reputasi lembaga tersebut.

Bagi masyarakat pada umumnya, kalibrasi secara tidak langsung melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan undang-undang dengan cara memastikan bahwa hasil pengujian alat telekomunikasi mendekati nilai sebenarnya sehingga alat telekomunikasi betul-betul bekerja sesuai alokasi frekuensi yang telah diatur oleh pemerintah. Salah satu tujuan dari alokasi frekuensi adalah menghindari terjadinya interferensi antara sebuah alat telekomunikasi dengan alat telekomunikasi yang lain. Interferensi dapat menindas sinyal yang diinginkan, menyebabkan kerugian sinyal, atau dapat mempengaruhi kualitas suara dan gambar. Jika hal ini terjadi pada alat telekomunikasi yang krusial dalam hal keselamatan, seperti alat komunikasi antara pilot dengan ATC, maka terjadinya interferensi dapat menimbulkan kerugian berupa nyawa manusia.



Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target penyelesaian kalibrasi instrumen pengukuran perangkat telekomunikasi pada tahun 2024 sebesar 96% dari total permohonan kalibrasi. Sepanjang tahun 2024 BBPPT menerima permohonan dari berbagai pihak yang jika dipilah berdasarkan pemohon, 104 permohonan berasal dari internal BBPPT, 132 permohonan berasal dari UPT Balai Monitor, serta 2 permohonan berasal dari pihak selain SDPPI. Dari 238 permohonan kalibrasi sepanjang tahun 2024 telah diterbitkan 233 Laporan Hasil Kalibrasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa capaian persentase penyelesaian kalibrasi instrumen pengukuran perangkat telekomunikasi pada tahun 2024 adalah sebesar 97.9% yang berarti target capaian telah terpenuhi.



Bulan	Jumlah Permohonan Terbit	Jumlah LDK Selesai	Akumulasi Jumlah Permohonan	Akumulasi Jumlah LDK Selesai	Prosentase penyelesaian Kalibrasi (%)
Januari	18	9	18	9	50
Februari	18	9	18	9	50
Maret	18	9	18	9	50
April	18	9	18	9	50
Mei	18	9	18	9	50
Juni	18	9	18	9	50
Juli	18	9	18	9	50
Agustus	18	9	18	9	50
September	18	9	18	9	50
Oktober	18	9	18	9	50
November	18	9	18	9	50
Desember	18	9	18	9	50



Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana realisasi pada tahun 2021 adalah 91.38%, realisasi pada tahun 2022 adalah 96.72%, serta realisasi pada tahun 2023 adalah 100%, terdapat penurunan pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 97.9%. Meskipun terdapat penurunan, namun target tahun 2024 tetap tercapai dengan baik. Penurunan realisasi pada tahun 2024 disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kontrol laboratorium kalibrasi BBPPT, yakni kondisi **DUC (Device Under Testing)** yang ditemukan rusak saat akan dilakukan proses kalibrasi. Hal ini sulit untuk dihindari karena untuk DUC yang dikalibrasi di lapangan, pemeriksaan fungsi baru bisa dilakukan saat tim kalibrasi berada dilokasi tempat DUC dipasang.

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan daya saing dan penguatan teknologi pengujian melalui kerjasama sesuai standar internasional	Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur	95%	91.38%	95%	96.72%	96%	100%	96%	100%



Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan pada laboratorium kalibrasi meliputi personel kalibrasi, peralatan ukur (kalibrator), metode kalibrasi serta ruangan laboratorium. Sumber daya berupa personel kalibrasi dimaksimalkan dengan cara memberikan pelatihan pada personel kalibrasi sehingga seorang personel tidak hanya menguasai satu fitur kalibrasi namun beberapa fitur kalibrasi sehingga dapat memperluas kapasitas kalibrasi dari laboratorium kalibrasi BBPPT. Melakukan penjadwalan kalibrasi kalibrator yang sesuai sehingga dapat meminimalisir antrean dan penolakan permohonan kalibrasi yang diakibatkan oleh tidak tersedianya kalibrator karena sedang dilakukan kalibrasi. Melakukan pemutakhiran metode kalibrasi secara berkala untuk menunjang kelancaran proses kalibrasi. Terakhir, mengkondisikan ruangan sesuai Panduan Mutu yang berdasarkan kepada ISO 17025.



Analisis Penyebab Keberhasilan

Target capaian dapat terpenuhi dengan baik karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Kalibrasi BBPPT. Pelibatan personel kalibrasi dengan cara rapat dan koordinasi secara berkala serta pembekalan pengetahuan melalui pelatihan memungkinkan setiap personel untuk dapat memberikan performa yang lebih baik. Selain itu, penunjang kalibrasi berupa peralatan ukur kalibrasi (kalibrator) juga diperhatikan dengan cara melakukan maintenance dan kalibrasi peralatan ukur secara berkala sesuai Panduan Mutu yang berdasarkan kepada ISO 17025. Tersedianya metode kalibrasi terkait cara penggunaan alat ukur dan langkah-langkah kalibrasi yang dimutakhirkan secara berkala juga menunjang lancarnya pelaksanaan kalibrasi. Terakhir, pelibatan aplikan dari internal SDPPI, meliputi laboratorium pengujian BBPPT dan UPT Balai Monitor, terkait jadwal kalibrasi instrumen pengukuran memungkinkan untuk mengatur kapasitas kalibrasi agar tidak terjadi penumpukan antrean kalibrasi sehingga permohonan kalibrasi dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.



Upaya Nyata yang Dilakukan untuk Mencapai Sasaran dan Indikator Tersebut

Berikut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan indikator.

1. Melakukan pembagian beban kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap personel laboratorium kalibrasi di BBPPT.
2. Melakukan rapat antar personel laboratorium kalibrasi guna mengetahui kebutuhan dari laboratorium kalibrasi.
3. Pembuatan jadwal kalibrasi instrumen pengukuran milik internal BBPPT.
4. Koordinasi dengan pihak UPT Balai Monitor terkait jadwal kalibrasi instrumen pengukuran milik UPT Balai Monitor
5. Melakukan pelatihan tentang teori kalibrasi, penggunaan alat ukur dengan mengundang narasumber berdasarkan keahlian yang dibutuhkan.
6. Melakukan maintenance dan kalibrasi peralatan ukur secara berkala.
7. Memastikan kondisi laboratorium sesuai dengan persyaratan ISO 17025.
8. Melakukan pemutakhiran metode kalibrasi.

IKSK 2.3

JUMLAH KERJASAMA YANG TERJALIN DENGAN LABORATORIUM/ORGANISASI PENGUJIAN PERANGKAT/INSTITUSI PENDIDIKAN/INSTITUSI LAINNYA

Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	%
Jumlah Kerjasama yang terjalin dengan Laboratorium/Organisasi Pengujian Perangkat/Institusi Pendidikan/Institusi lainnya	3	4	133.33%

Peresmian IDTH pada tanggal 7 Mei 2024 menjadi tonggak penting dalam perkembangan IDTH. Acara peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 memberikan pengaruh besar terhadap visibilitas dan reputasi IDTH, baik di tingkat nasional maupun internasional. Momentum ini tidak hanya menjadi pengakuan resmi atas keberadaan IDTH, tetapi juga memperkuat komitmen lembaga dalam mendukung pengembangan teknologi dan inovasi di Indonesia.

Setelah peresmian, exposure IDTH meningkat pesat, yang ditandai dengan tingginya antusiasme dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) yang melakukan kunjungan ke IDTH. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi dan potensi IDTH, serta mengeksplorasi peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat strategis bagi kedua belah pihak. Dalam pidatonya saat peresmian, Presiden menegaskan pentingnya peran IDTH dalam membantu riset dan pengembangan teknologi dalam negeri, yang menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing bangsa di kancah global.

Sejalan dengan arahan tersebut, selama tahun 2024, IDTH telah menjalin sejumlah kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Kerja sama ini melibatkan sektor pendidikan, laboratorium pengujian perangkat, hingga perusahaan teknologi, dengan berbagai ruang lingkup yang mencakup:

1. Pengembangan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan teknologi masa depan.
3. Pengujian dan sertifikasi perangkat untuk memastikan kualitas dan keamanan yang sesuai dengan standar internasional.

Kerja sama tersebut diatur melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan strategis IDTH. Setiap kolaborasi dirancang secara sistematis dengan ruang lingkup dan target yang jelas, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Beberapa kerjasama dan MoU yang telah dilakukan selama tahun 2024 diantaranya

1. Kerjasama antara IDTH dengan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Badan Standardisasi Nasional mengenai Sinergitas Dalam Rangka Pengembangan dan Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari

2024 dengan ruang lingkup :

- Peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan dan pengelolaan laboratorium kalibrasi lingkup kelistrikan, waktu, dan frekuensi;
- Peningkatan sumber daya perangkat kalibrasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan laboratorium kalibrasi lingkup kelistrikan, waktu, dan frekuensi;

2. Kerjasama antara IDTH dengan Universitas Indonesia mengenai Sinergitas dalam rangka Kerja Sama Teknis dan Pengembangan Sumber Daya di bidang Teknik Elektro, Teknik Komputer, dan Teknik Biomedik pada tanggal 16 Mei 2024 dengan ruang lingkup :

- i. Penguatan substansi melalui seminar/kuliah umum terkait:
 - a) Teknik Telekomunikasi;
 - b) Teknik Elektronika;
 - c) Teknik Komputer;
 - d) Teknik Kontrol; dan
 - e) Teknik Biomedik.
 - f) Pelatihan teknis di bidang pengujian perangkat telekomunikasi.
 - g) Pemberian kesempatan kegiatan magang/kerja praktik/penelitian.
 - h) Penyediaan narasumber terkait kegiatan pengembangan BBPPT.
 - i) Keterlibatan bersama dalam pengembangan riset dan teknologi di forum nasional dan internasional.
 - j) Pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat.

3. Kerjasama antara IDTH dengan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) mengenai Pengujian *Electromagnetic Compatibility* Pada Alat Kesehatan pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan ruang lingkup :

1. Pengembangan Sertifikasi melalui dukungan Pengujian EMC.
2. Berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) terkait Alat Kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi.
3. Pengembangan metode Pengujian dan kalibrasi Alat Kesehatan.
4. Kerjasama antara IDTH dengan Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI) mengenai Sinergisitas dalam Rangka Kerja Sama Teknis dan Pengembangan Sumber Daya di Bidang Alat dan Perangkat Telekomunikasi Internet of Things pada tanggal 19 Desember 2024 dengan ruang lingkup :

1. Penguatan substansi dan teknis melalui berbagi pengetahuan dan informasi di bidang penguatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelaku industri bidang IoT.
2. Pemberian kesempatan kegiatan magang dan penelitian.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana terkait pengujian perangkat IoT.
4. Keterlibatan bersama dalam forum nasional dan internasional.
5. Diseminasi informasi terkait perkembangan teknologi IoT.

Target dan realisasi jumlah kerja sama yang terjalin pada tahun 2021 sampai 2024 ditampilkan pada gambar berikut. Seiring dengan meningkatnya kerja sama dengan pihak lain, IDTH dinilai memiliki potensi yang tinggi untuk memberikan manfaat keberbagai pihak.

2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	1	1	3	1	3	3	4



SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT.

7. IKS 3.1 Indeks Integritas Pelayanan Publik atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024

Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)

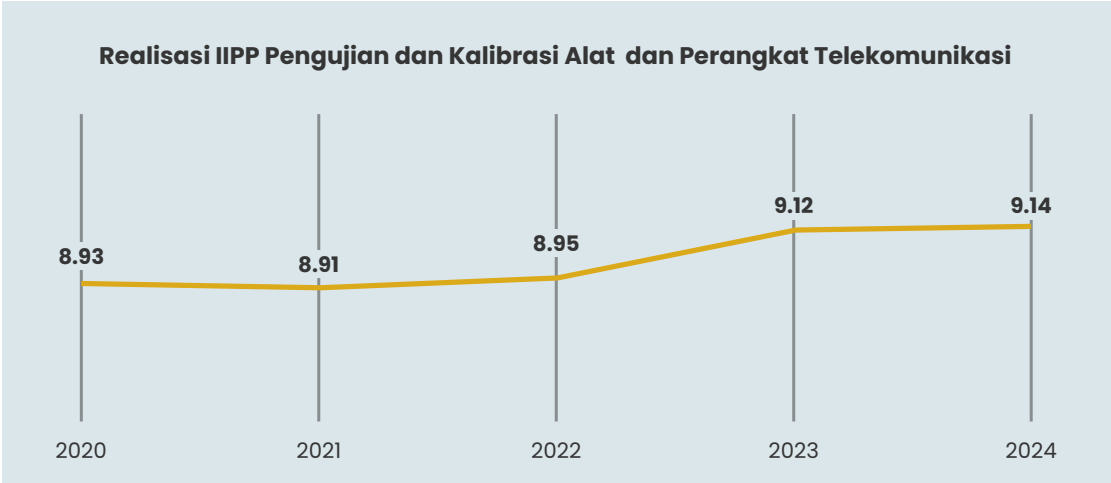
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2024	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT	Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)	>8.50	9.14	111.46

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) memperlihatkan gambaran besaran tingkat konsistensi pejabat/petugas unit layanan publik di BBPPT dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, prosedur dan kode etik unit layanan berdasarkan parameter dan standar integritas yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. IIPP dilakukan pengukuran dengan melibatkan tiga pihak yaitu:

Pihak Eksternal	Pihak internal	Pakar
Penilaian oleh pengguna layanan atas indikator seperti diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur, penerimaan imbalan, pungutan liar, dan percaloan / perantara tidak resmi.	Pegawai BBPPT untuk penilaian terhadap budaya organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran, yang menggambarkan capaian sistem pencegahan dan penerapan anti korupsi di instansi.	Para ahli atau orang-orang yang memahami layanan publik di BBPPT, penilaian terhadap transparansi dan sistem anti korupsi.

Peningkatan realisasi secara berkelanjutan atas nilai IIPP pengujian dan kalibrasi alat dan perangkat telekomunikasi sejak tahun 2020 sebesar 2,3% menunjukkan bahwa petugas unit layanan publik di BBPPT telah menyelenggarakan layanan sesuai dengan prosedur dan kode etik berdasarkan standar integritas yang berlaku. Perkembangan realisasi nilai IIPP pengujian dan kalibrasi alat dan perangkat telekomunikasi disajikan pada bagan berikut.

Gambar 1. Perkembangan Nilai IIPP Pengujian dan Kalibrasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi



Berdasarkan tabel berikut ditunjukkan bahwa IIPP pengujian alat dan perangkat telekomunikasi pada tahun 2024 bernilai 9,14 (skala ukur 1-10). Nilai IIPP tersebut telah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00 (skala ukur 1-10). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik BBPPT sudah berintegritas dalam hal transparansi, sistem antikorupsi dan integritas pegawai. Jika ditinjau lebih lanjut, indikator dengan nilai IIPP terbesar yaitu “Percaloan / Perantara Tidak Resmi” sebesar 9,30. Meskipun indikator “Diskriminasi Pelayanan” menjadi indikator dengan penilaian terendah yaitu 8,94 namun nilai tersebut masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh KPK. Secara keseluruhan, nilai IIPP untuk seluruh indikator memiliki nilai yang sangat baik dan diindikasikan tidak terdapat hal negatif dalam penyelenggaraan layanan di unit layanan publik terkait.

Tabel 1. IIPP Pengujian dan Kalibrasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Tahun 2024

No.	Indikator	Skala 1-10
1.	Diskriminasi Pelayanan	8.94
2.	Pelayanan Di Luar Prosedur	9.05
3.	Penerimaan Imbalan	9.17
4.	Pungutan Liar	9.22
5.	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	9.30
IIPP Pengujian dan Kalibrasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi		9.14

Penyelenggaraan pelayanan publik BBPPT berdasar pada kebijakan yang dibentuk dengan memperhatikan ketentuan teknis, parameter, dan standar integritas yang berlaku. Dalam hal penjaminan prosedur, dilakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan standar pelayanan sebagai tolok ukur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, dilakukan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai instruksi baku yang menjadi acuan pelaksanaan aktivitas berdasarkan mutu baku yang disesuaikan terhadap sumber daya yang tersedia. Selain itu, kualitas personel pelayanan publik terus ditingkatkan melalui resfreshment dan pelatihan guna memotivasi pegawai untuk bekerja baik dan mengelola persepsi untuk memberdayakan diri sehingga dapat memberikan pelayanan yang beretika dan berintegritas. Hal ini didukung oleh penerapan Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BBPPT sebagai acuan norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan publik di lingkungan BBPPT dalam menjalankan tugas pelayanan terhadap nilai akuntabilitas, integritas, kedisiplinan, dan sebagainya.

Dalam hal sistem yang dibangun, dilakukan pengawasan internal melalui pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, dan whistleblowing system yang dipantau dan dievaluasi setiap triwulan. Selain itu, diputarakan public announcement secara rutin untuk meningkatkan kesadaran baik bagi internal BBPPT dan pengguna layanan terkait komitmen dan penyelenggaraan pelayanan publik BBPPT yang berintegritas.



8. IKS 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024

Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2024	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT	Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d. 4)	>3.60	3.81	108.86%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperlihatkan gambaran tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sasaran penilaian IKM ini adalah untuk:

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
- Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, ruang lingkup penilaian IKM meliputi:

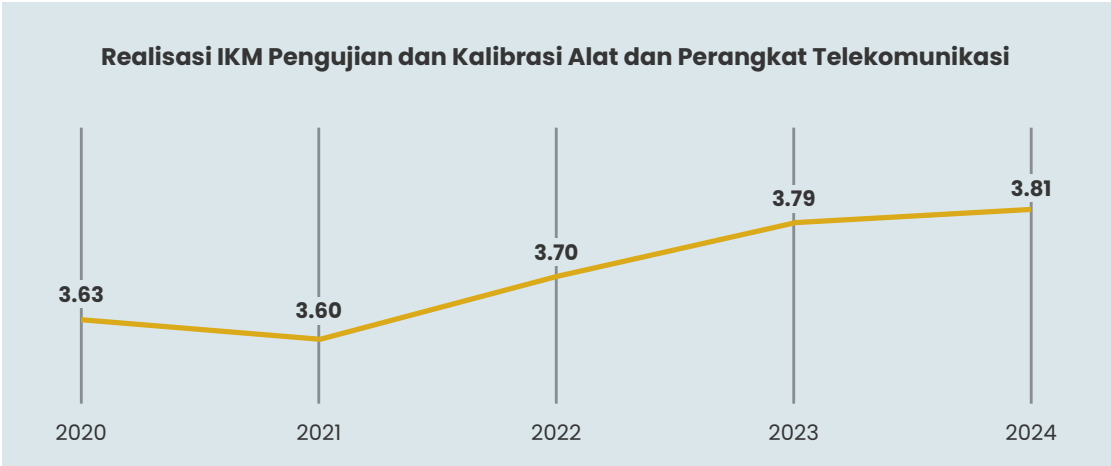
Persyaratan	Sistem, Mekanisme, & Prosedur	Waktu Penyelesaian
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.	Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.	Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya / Tarif	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Kompetensi Pelaksana
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.	Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Perilaku Pelaksana	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Sarana & Prasarana
Sikap petugas dalam memberikan pelayanan.	Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.	Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, dan merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.



Gambar 1. Perkembangan Nilai IKM Pengujian dan Kalibrasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperlihatkan gambaran tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sasaran penilaian IKM ini adalah untuk:

Tabel 1. IKM Pengujian dan Kalibrasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Tahun 2024

No.	Indikator	Skala 1-4	Skala 1-10	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit
1.	Persyaratan Pelayanan	3.71	90.43	A	Sangat Baik
2.	Prosedur Pelayanan	3.74	91.35	A	Sangat Baik
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Layanan	3.72	90.69	A	Sangat Baik
4.	Tarif / Biaya Pelayanan	3.92	97.51	A	Sangat Baik
5.	Produk Hasil Layanan	3.86	95.28	A	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.77	92.33	A	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3.91	96.98	A	Sangat Baik
8.	Layanan Konsultasi dan Pengaduan	3.63	87.95	B	Baik
9.	Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	3.84	94.56	A	Sangat Baik
IKM Pengujian dan Kalibrasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi		3.81	93.59	A	Sangat Baik

Nilai tersebut merupakan representasi dari responden pengguna layanan BBPPT yang berjumlah 151 orang. Persebaran profil responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki (74,83%), mayoritas usia secara keseluruhan yaitu 24-39 tahun (58,94%), dengan sebagian besar pendidikan terakhir di tingkat S1 sederajat (72,19%). Secara keseluruhan responden yang disurvei pada tahun 2024 menghasilkan IKM BBPPT atas penyelenggaraan layanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebesar 3,81 (dalam skala 1-4) atau 93,59 (dalam skala 1-100). Indeks ini sudah masuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan mutu pelayanan A (nilai berada antara 88,31 – 100,00), artinya layanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi di BBPPT sudah sangat baik, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di BBPPT. Penilaian “Sangat Baik” ini berdasarkan tabel interpretasi IKM Pengguna Layanan BBPPT.

IKM ini tercermin pada 9 (sembilan) nilai indikator yang membangun IKM, dimana delapan dari sembilan nilai indikator pembangun IKM sudah berada di atas nilai 88,31 (ambang batas bawah untuk kategori sangat baik). Satu-satunya indikator yang masih berada di bawah nilai tersebut adalah indikator “Layanan Konsultasi dan Pengaduan” dengan nilai 3,63 atau 87,95 yang termasuk dalam kategori “Baik” dengan predikat mutu pelayanan B.

BBPPT sebagai penyelenggara layanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi menyediakan layanan pengaduan melalui berbagai kanal diantaranya:

-  **Call Center** : (021) 77817996-9 (hunting)
-  **Call Center** : 159 (SDPPI)
-  **WhatsApp** : 0812 5000 0586
-  **Surel** : pelayanan.bbppt@kominfo.go.id
-  **Website** : bbppt.postel.go.id
-  **Loket** : Kantor BBPPT (Jalan Raya Tapos, Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, 16457)
-  **Surat** : Alamat kantor BBPPT



Peningkatan realisasi nilai IKM tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dicapai melalui konsistensi BBPPT untuk melakukan peningkatan layanan secara berkelanjutan melalui penjangkaran saran dan masukan melalui banyak kanal. Forum diskusi menjadi media pengumpulan informasi dan sosialisasi yang mencakup paling banyak audiens, dimana setiap tahunnya BBPPT melibatkan banyak pengguna layanan untuk melakukan diskusi agar dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan sebelum dilakukannya pengambilan keputusan, diantaranya konsultasi publik dalam hal penyusunan petunjuk pelaksanaan layanan pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan kalibrasi alat ukur, bimbingan teknis pembukaan layanan Electromagnetic Compatibility Radiated, Specific Absorption Rate, dan Laser Safety, dan sebagainya. Selain itu, layanan konsultasi dan pengaduan yang berfungsi untuk media diskusi teknis permohonan pengujian dan kalibrasi juga menjadi media tambahan untuk pengumpulan aspirasi dan masukan. Setiap bulan secara rutin dilakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas pengaduan dan konsultasi yang telah disampaikan oleh pengguna layanan.



Upaya lain dalam rangka peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui penciptaan inovasi seperti percepatan durasi layanan, penghapusan tahapan verifikasi fungsi layanan pengujian perangkat telekomunikasi yang mempercepat alur layanan, sistem billing terintegrasi dengan Kementerian Keuangan dengan opsi channel pembayaran yang lebih beragam, notifikasi progress layanan via WhatsApp kepada pengguna layanan, serta kemudahan pengajuan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang dapat dilakukan melalui Sistem Manajemen Pelayanan Pengujian (SIMPEL) BBPPT.



9. IKS 3.3 Persentase (%) Pencapaian Target PNBP Biaya Pengujian dan Kalibrasi target yang ditetapkan Tahun 2024

IKSK 3.3 – Persentase (%) Pencapaian Target PNBP Biaya Pengujian dari target yang ditetapkan Tahun 2024 (Rp. 10.575.000.000)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2024	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT	Indeks Integritas Pelayanan Publik Atas Pelayanan Pengujian Perangkat TIK Tahun 2024	Rp. 10.575.000.000,-	Rp. 36.517.158.000,-	345

Pada tahun 2024, target **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** dari Biaya Pengujian ditetapkan sebesar Rp 10.575.000.000,-. Hingga akhir tahun, realisasi pencapaian mencapai Rp 36.517.158.000,-, yang melampaui target secara signifikan dengan realisasi mencapai 345,31% dari target awal. Hasil ini mengindikasikan adanya faktor-faktor pendukung yang signifikan, seperti peningkatan volume pengujian, penyesuaian tarif, atau efisiensi operasional.

Upaya Peningkatan Layanan

Keberhasilan ini didapat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh BBPPT dalam meningkatkan layanan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang telah diambil:

Dari Sisi Pelayanan

1. Revisi Juknis Pelayanan:

- Melakukan evaluasi dan revisi terhadap pedoman pelayanan (juknis) agar lebih responsif terhadap kebutuhan aplikasi dan memastikan proses pelayanan berjalan lebih efisien.
- Memastikan juknis memberikan petunjuk yang jelas dan mudah dipahami bagi aplikasi.

2. Pengoptimalan Sistem Layanan Online:

- Memperbarui sistem layanan online agar lebih responsif dan mudah diakses oleh aplikasi.
- Memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan aplikasi melakukan pengujian secara daring dan mengakses hasil pengujian secara real-time.

3. Peningkatan Komunikasi dengan Aplikasi:

- Meningkatkan komunikasi proaktif dengan aplikasi terkait status pengujian, persyaratan, dan informasi lainnya.
- Memberikan bantuan yang lebih baik melalui saluran komunikasi yang beragam, seperti layanan online (WhatsApp, email, telepon).

4. Pelayanan Konsultasi:

- Menyediakan layanan konsultasi aktif kepada aplikasi untuk membantu mereka memahami persyaratan pengujian dan regulasi yang berlaku.



Dari Sisi Laboratorium

1. Revisi Juknis Pengujian dan Prosedur Laboratorium:

- Melakukan evaluasi dan revisi juknis pengujian serta prosedur laboratorium untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengujian.
- Memastikan bahwa pedoman laboratorium selalu terkini dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

2. Percepatan Proses Pengujian:

- Mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah yang dapat mempercepat proses pengujian tanpa mengorbankan kualitas hasil.
- Menggunakan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengujian.

3. Pelatihan dan Pengembangan Penguji:

Memberikan pelatihan reguler kepada penguji laboratorium agar tetap terampil dan berpengetahuan dalam menghadapi perubahan teknologi.
Mendorong penggunaan teknologi terbaru dalam laboratorium.

4. Kemitraan dengan Industri:

Membangun kemitraan dengan industri telekomunikasi untuk memahami kebutuhan pengujian yang mendesak dan mendapatkan masukan terkait pengembangan laboratorium.

5. Monitoring Kinerja dan Evaluasi Rutin:

Melakukan pemantauan kinerja laboratorium secara rutin untuk mengidentifikasi potensi perbaikan.

Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian secara berkala untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil.

Dari Sisi Marketing

1. Peningkatan Promosi Layanan:

- **Sosialisasi yang Intensif:** Tim pengembangan layanan telah melakukan sosialisasi secara intensif mengenai layanan pengujian kepada target pasar. Ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran seperti seminar, workshop, kunjungan langsung, kampanye digital, dan penyebaran informasi melalui brosur, flyer, dan presentasi langsung kepada calon pelanggan.
- **Studi Kompetitor:** Melakukan analisis mendalam terhadap layanan dan harga kompetitor, kemudian menyusun strategi diferensiasi yang menarik.
- **Identifikasi Target Pasar:** Membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih spesifik untuk memudahkan penentuan strategi pemasaran yang tepat sasaran.
- **Kolaborasi dengan Mitra Strategis:** Menjalin kerja sama dengan target pasar yang potensial terhadap peningkatan PNBP.

Analisis Pencapaian Target

Dengan mencapai persentase pencapaian sebesar 345,32%, BBPPT membuktikan keberhasilan dalam manajemen yang cermat dan strategis serta kebijakan yang membuat BBPPT sebagai pilihan laboratorium terlengkap untuk pengujian perangkat telekomunikasi. Peningkatan ini menggambarkan kemampuan BBPPT untuk mengelola PNBP dengan efektif. BBPPT tetap berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada aplikan. Peningkatan pencapaian target ini mencerminkan respons positif terhadap upaya BBPPT dalam meningkatkan kualitas pengujian dan kalibrasi. Evaluasi kinerja rutin dan umpan balik aplikan menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi.

Persentase Pencapaian

Persentase Pencapaian = $(\text{Pencapaian} / \text{Target}) \times 100$

Dengan menerapkan rumus tersebut: Persentase Pencapaian = $(36.517.158.000 / 10.575.000.000) \times 100 \approx 345,32\%$

Pencapaian ini tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampaui sebesar 245,32%. Ini mencerminkan efisiensi dan keberhasilan dalam manajemen serta pelaksanaan pengujian perangkat di laboratorium BBPPT.

Kesimpulan dan Rencana Ke Depan

Keberhasilan pencapaian target ini menunjukkan bahwa rencana dan strategi yang diterapkan berhasil. Dalam konteks finansial, pencapaian di atas target ini memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pencapaian sebesar 345,32% ini dianggap sebagai pencapaian yang membanggakan dan menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan yang dapat diterapkan pada periode berikutnya.

Untuk ke depannya, BBPPT akan:

1. Terus meningkatkan efisiensi operasional untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
2. Melakukan evaluasi dan pembaruan rutin terhadap proses pengujian dan kalibrasi.
3. Memperluas jangkauan layanan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas.

Dengan komitmen dan dedikasi, BBPPT optimis dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di masa depan.





SASARAN KEGIATAN 4

Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif.

10. IKSK 4.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran BBPPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	%
Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024	87	85.13	97.85

Pengaturan mengenai perencanaan anggaran dan pelaporan anggaran yang ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Keuangan (PMK)** Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mulai diterapkan dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024. PMK tersebut merupakan sinergi Monev DJA dan DJPB dalam meningkatkan kualitas belanja. Menindaklanjuti amanat dalam PMK 62 tersebut, ditetapkan **Keputusan Menteri Keuangan (KMK)** Nomor 466 Tahun 2023 terkait Pedoman Teknis pelaksanaan PPKA dan **Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)** Perencanaan Anggaran. Dengan KMK tersebut, penyerapan anggaran dan konsistensi RPD menjadi fokus pemantauan di DJPB (Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA), sedangkan efektivitas dan efisiensi menjadi fokus di DJA (Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran/EKA). Kategori Nilai Kinerja Anggaran mulai dari Sangat Kurang sampai Sangat Baik, dapat dilihat pada table berikut

Nilai	Kategori
0 s.d 50	Sangat Kurang
>50 s.d 60	Kurang
>60 s.d 80	Cukup
>80 s.d 90	Baik
>90 s.d 100	Sangat Baik

Adapun capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024 adalah 85,13 (Baik) terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (bobot 50%) sebesar 37,5 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (bobot 50%) sebesar 47,63.



Nilai Kinerja Anggaran BBPPT Tahun 2024 adalah **85,13 (Baik)**

A. Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran (PPKA) dan EKA Perencanaan Anggaran

PPKA berguna antara lain memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, pengendalian belanja negara dan peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja. Ruang lingkup terdiri dari Kualitas informasi kinerja meliputi ketersediaan dan kelengkapan informasi kinerja dalam dokumen, kejelasan informasi kinerja, relevansi dan keterukuran.

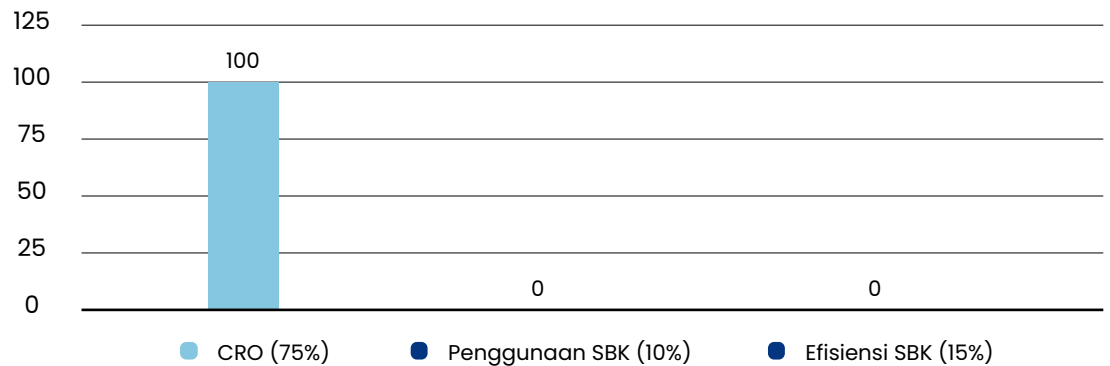
Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Perencanaan Anggaran terdiri dari variabel efektivitas yakni capaian Rincian Output (RO) dikaitkan dengan IKP dan ISS, serta efisiensi yakni penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Efisiensi SBK. Capaian RO (RVRO/TVRO) memiliki bobot maksimal 75, penggunaan SBK bobot maksimal 10, dan efisiensi SBK bobot maksimal 15. Capaian per RO yaitu membandingkan antara Realisasi Volume RO dengan Target RO selanjutnya dihitung rata-rata aritmatik capaian per RO, sedangkan Penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran Khusus/SBKK dan Standar Biaya Keluaran Umum/SBKU) adalah menghitung jumlah RO menggunakan SBK dibandingkan jumlah RO keseluruhan, dan efisiensi SBK adalah membandingkan hasil pengurangan antara Indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran K/L	Efektivitas (75) Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25) Agregasi Capaian IKP EUI (20) Agregasi Capaian RO Satker (30) +			Efisiensi (25) Agregasi Nilai Efisiensi Satker (25)												
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I	Efektivitas (75) Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) (30) Agregasi Capaian RO Satker (45) +			Efisiensi (25) Agregasi Capaian RO Satker (25)												
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker	<table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>0 s.d 50</td><td>Sangat Kurang</td></tr><tr><td>>50 s.d 60</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>>60 s.d 80</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>>80 s.d 90</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>90 s.d 100</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Nilai	Kategori	0 s.d 50	Sangat Kurang	>50 s.d 60	Kurang	>60 s.d 80	Cukup	>80 s.d 90	Baik	>90 s.d 100	Sangat Baik	Efektivitas (75) Agregasi Capaian RO (RVRO/TVRO) (30) +		Efisiensi (25) Pengurangan SBK (10) Efisiensi SBK (15)
Nilai	Kategori															
0 s.d 50	Sangat Kurang															
>50 s.d 60	Kurang															
>60 s.d 80	Cukup															
>80 s.d 90	Baik															
>90 s.d 100	Sangat Baik															

*Materi Kebijakan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024, disampaikan tanggal 24 September 2024.

Hasil RVRO BBPPT pada akhir Desember 2024, adalah seluruh RO mencapai target sesuai TVRO yang ditetapkan, sehingga mencapai Nilai Maksimal 100 untuk variabel Capaian RO (75%). Sedangkan untuk SBK, pada tahun 2024 BBPPT belum menggunakan baik SBKU dan SBKK sehingga tidak memperoleh nilai untuk variabel penggunaan SBK dan efisiensinya.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



B. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA

Nilai IKPA pada akhir Desember 2024 adalah 95,26, terdiri dari Kualitas Perencanaan Anggaran (25%) dengan nilai 94,42 meliputi Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, Kualitas Pelaksanaan Anggaran (50%) dengan nilai 94,78 meliputi Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, serta Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran meliputi Capaian Output (25%) dengan nilai 100. Dispensasi SPM merupakan faktor pengurang dalam penghitungan Nilai Akhir, dalam hal ini tidak ada Dispensasi tersebut.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai dengan: Desember

No.	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Ket.	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Hasil Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pengelolaan UP dan TUP	Penyelesaian Tagihan	Belanja Kontraktual	Penyerapan Anggaran	Capaian Output				
1	023	059	677011	BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	Nilai	100.00	89.83	88.73	100.00	100.00	90.39	100.00	95.26%	100%	0.00	95.26
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.47	17.75	10.00	10.00	9.04	25.00				
					Nilai Aspek	94.92		94.78				100.00				

I. Sasaran

Sasaran terwujudnya tata Kelola administrasi BBPPT yang efisien dan efektif pada tahun 2024 untuk indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPPT tidak terpenuhi yaitu 85,13 dari target 87 di Perjanjian Kinerja BBPPT. Nilai Kinerja tersebut terdiri dari nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada akhir Desember 2024 yaitu 75 (bobot 50%) sedangkan nilai IKPA adalah 95,26 (bobot 50%).

II. Capaian Target

Capaian 85,13 adalah penghitungan secara bobot untuk tahun berjalan (2024) mencakup nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada akhir Desember 2024 yaitu 75 (bobot 50%) sedangkan nilai IKPA adalah 95,26 (bobot 50%). sehingga setelah dibobotkan BBPPT memperoleh nilai kinerja anggaran (NKA) 85,13. Tahun 2021 NKA BBPPT adalah 93,24 terdiri dari nilai SMART 96,71 dan nilai IKPA 88,04; tahun 2022 adalah 83,00 terdiri dari nilai Smart 79,68 dan nilai IKPA 88,24; dan tahun 2023 NKA BBPPT mencapai 87 terdiri dari nilai Smart 86,42 dan nilai IKPA 87,50. Untuk tahun 2024, NKA BBPPT adalah 85,13.

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Sasaran Program (3)	2021		2022		2023		2024	
			Target (6)	Realisasi (7)	Target (8)	Realisasi (9)	Target (10)	Realisasi (11)	Target (12)	Realisasi (13)
1.	terwujudnya tata Kelola administrasi BBPPT yang efisien dan efektif	Nilai Kinerja Anggaran	86	93	87	83	87	87	87	85.13

Sumber : Rencana Strategis Ditjen SDPPI Tahun 2020 dan capaian

III. Analisa keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Untuk indikator NKA tahun 2024, Nilai yang diperoleh adalah 85,13 tidak mencapai target 87. Hal ini dipengaruhi oleh diimplementasikannya kebijakan baru tentang evaluasi kinerja perencanaan anggaran yang mana penggunaan SBK dan efisiensi SBK memiliki bobot dalam menghasilkan variabel efisiensi dalam kinerja perencanaan. BBPPT saat ini belum menggunakan SBK sehingga variabel efisiensi nol (0), menyebabkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran hanya diperoleh dari efektivitas melalui capaian RVRO. Dalam upaya meningkatkan capaian Nilai Kinerja tersebut, perlu dilakukan analisis pembahasan dengan Satker terkait guna mengusulkan SBKK BBPPT, yang akan digunakan dalam perencanaan program tahun mendatang.

Meskipun demikian, untuk memperoleh masukan demi tercapainya nilai kinerja anggaran yang optimal dari aspek nilai Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dilakukan koordinasi internal, Setditjen SDPPI serta dengan Biro Perencanaan mengenai progress Program kerja dan anggaran, maupun penyampaian Notadinas terkait target penyerapan setiap Rincian Output.

Disamping itu, dilaksanakan beberapa kali rapat pembahasan monitoring dan evaluasi anggaran maupun nilai IKPA dengan mengundang narasumber kompeten dari Direktorat Teknologi Informasi Ditjen Anggaran utamanya dalam rangka mensosialisasikan kebijakan Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran yang mulai diimplementasikan Tahun 2024, dan mengundang pula narasumber dari KPPN Bogor untuk memperoleh masukan dan saran demi mencapai target Nilai IKPA yang optimal.

Mengingat salah satu program kerja BBPPT yakni Mobilisasi Lab SAR dari Bintara ke BBPPT Tapos termasuk dalam Prioritas Nasional (PN), maka koordinasi dan rapat intens dilakukan rutin terhadap progress pekerjaan tersebut antara tim teknis, PPK dan penyedia agar memenuhi target timeline pekerjaan yang berdampak signifikan terhadap tercapainya output dan realisasi anggaran yang optimal.

IV. Efisiensi Penggunaan sumber daya

Dalam menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran BBPPT tahun 2024 sebesar 85,13, sumber daya yang tersedia telah dioptimalkan, seperti beberapa program kegiatan yang rutin operasional dan tidak menunggu proses lain seperti tender dan lainnya telah dimajukan pelaksanaannya sehingga sebagian kegiatan selesai lebih cepat dan menjadi lebih efisien. Untuk program Prioritas Nasional mobilisasi Lab SAR dari Bintara ke Tapos, juga selesai lebih cepat dari jadwal awal.

Disamping itu, beberapa Program Kerja melebihi target seperti jumlah kerjasama teknis, kegiatan Forum Diskusi terlaksana dengan baik mencakup sosialisasi Juklak Pengujian terbaru, pembayaran biaya

V. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang perolehan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPPT adalah pelaksanaan rapat yang melibatkan perwakilan seluruh tim kerja BBPPT serta mengundang narasumber berkompeten seperti dari Ditjen Anggaran Kemkeu dan KPPN Bogor. Selain itu, tim BBPPT juga aktif menghadiri sosialisasi dari instansi terkait, rapat konfirmasi, evaluasi dari Kemkominfo dan Ditjen SDPPI, serta mengisi aplikasi mengenai progress pekerjaan setiap bulan secara akurat dan tepat waktu.

VI. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut

Upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran terwujudnya tata Kelola administrasi BBPPT yang efisien dan efektif pada tahun 2023 dan perolehan Nilai Kinerja Anggaran BBPPT adalah dengan koordinasi internal untuk mempercepat penyelesaian program kerja rutin termasuk utamanya Program Prioritas Nasional dan sesuai timeline masing-masing kegiatan. Koordinasi eksternal dilaksanakan rapat-rapat sosialisasi kebijakan instansi dari DJA tentang Kinerja Perencanaan Anggaran dan dari KPPN Bogor tentang Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta pembahasan berkala dengan Setditjen SDPPI dan Biro Perencanaan Kominfo.





11. IKS 4.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Keuangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Per 30 September 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 September 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 426.010.305 yang berasal dari sewa rumah dinas, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Barang dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu. Realisasi Belanja Negara pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp 47.339.436.649 atau 62,08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 76.250.966.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2024. Nilai Aset per 30 September 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 780.812.800.959 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.434.139.362, Aset Tetap (netto) sebesar Rp 778.804.693.611 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 573.967.986. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.302.251.178 dan Rp 79.510.549.781.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp 258.424.650; sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 97.866.307.137 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (97.607.882.487). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos – Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 4.409.513 dan sebesar Rp 0; sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (97.603.472.974).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp 0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (97.603.472.974) kemudian ditambah Koreksi yang mengurangi ekuitas Rp. (2.213.390.261) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 879.327.413.016 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2024 adalah senilai Rp 779.510.549.781.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

No.	Indikator Penilaian Laporan Keuangan Satuan Kerja / UAKPA	Metode Penelitian			Nilai Kualitas LK
		Bobot	Faktor Pengurang	Nilai Pengurang	
I	Indeks				100
II	Faktor Pengurang				-100
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50%			
	1) Jumlah transaksi koreksi audit 0 s.d. 5		0%	0%	0
	2) Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d. 10		-5%	-3%	-2.5
	3) Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d. 15		-15%	-8%	-7.5
	4) Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d. 20		-30%	-15%	-15
	5) Jumlah transaksi koreksi audit lebih dari 20		-50%	-25%	-25
2	Kesalahan penganggaran berdasarkan LHP BPK	20%			-20
	1) Kesalahan akun Rp0 – Rp150jt		0%	0%	0
	2) Kesalahan akun di atas Rp150jt – Rp300jt		-5%	-1%	-1
	3) Kesalahan akun di atas Rp300jt – Rp600jt		-15%	-3%	-3
	4) Kesalahan akun di atas Rp600jt – Rp1.2 Miliar		-30%	-6%	-6
	5) Kesalahan akun lebih dari Rp 1.2 Miliar		-50%	-10%	-10
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun	10%			
	1) Tidak terdapat saldo kas		0%	0%	0
	2) Terdapat saldo kas		-100%	-10%	-10
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%			
	1) Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	10%			
	1) Efektif		0%	0%	0
	2) Efektif dengan Pengencualian		-30%	-3%	-3
	3) Mengandung Kelemahan Material		-70%	-7%	-7
6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%			
	1) Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5
III	Nilai Akhir (I+II)0				0



B. Kinerja Lainnya

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas, kualitas pengujian dan pelayanan kepada masyarakat serta industri telekomunikasi di Indonesia. Selain pencapaian kinerja utama yang diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPPT Tahun 2024, terdapat sejumlah capaian kinerja lainnya dan prestasi yang diraih oleh BBPPT dan turut berperan dalam mendukung tujuan strategis BBPPT, diantaranya:



BBPPT memperoleh penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tingkat Nasional



Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik.

BBPPT telah mendapatkan predikat pelayanan prima pada tahun 2023 untuk lingkup layanan jasa. Perolehan indeks yang baik pada tahun sebelumnya menjadi dasar pengusulan BBPPT sebagai

Core Business yang mewakili pelayanan publik Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk PEKPPP tahun penyelenggaraan pelayanan prima dan berhasil mendapatkan penghargaan 10 terbaik kelompok kementerian pada PEKPPP tahun 2024 dengan predikat “Pelayanan Prima”. Ketercapaian ini diupayakan melalui penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang ditinjau secara berkala dengan melibatkan berbagai stakeholder serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang mencakup seluruh kalangan.



BBPPT Melakukan Promosi Tingkat Nasional dalam Rangka Meningkatkan Branding dan Pengenalan Layanan

1. Partisipasi dalam Pameran Festival Infrastruktur Mutu Nasional (FIMN) Tahun 2024



BBPPT turut berpartisipasi pada kegiatan pameran FIMN pada tanggal 12-13 Agustus 2024 yang bertempat di Jakarta Convention Center. Acara ini dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta, termasuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi KAN, serta berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, dunia usaha, profesional, dan konsumen. Rangkaian kegiatan selama festival meliputi seminar internasional, pertemuan teknis LPK, pameran, pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta berbagai lokakarya, talk show, dan expo. Partisipasi BBPPT bertujuan untuk mempromosikan layanan yang dimiliki BBPPT kepada masyarakat luas. Selain itu, perwakilan BBPPT diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber pada sesi talkshow. Dalam sesi ini, dijelaskan lebih detail tentang profil BBPPT. Melalui sesi ini, peserta dapat berinteraktif mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Kegiatan promosi dalam pameran ini kami kemas supaya menarik pengunjung melalui adanya games yang seru dan souvenir yang menarik.

2. Partisipasi dalam Pameran Temu Bisnis 2024

BBPPT ikut berpartisipasi dalam acara Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Ke-VIII yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang. Dengan dilaksanakannya temu bisnis ini, diharapkan dapat meningkatkan serta mengoptimalkan perekonomian dalam negeri khususnya untuk produk dalam negeri. Selain itu, juga membuka kesempatan para pelaku usaha dalam negeri utamanya yang telah bersertifikat TKDN untuk meningkatkan produknya, sehingga mengurangi ketergantungan penggunaan produk impor. Pada acara ini, BBPPT membuka booth dalam pameran Temu Bisnis P3DN Ke-VIII yang bertujuan untuk mempromosikan BBPPT ke masyarakat luas tentang layanan yang dimiliki oleh BBPPT.



BBPPT Melakukan Dukungan Riset Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kebermanfaatan

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri telekomunikasi di Indonesia melalui kegiatan dukungan riset yang berbasis pada pengukuran perangkat telekomunikasi. Sebagian besar riset yang dilakukan oleh BBPPT berfokus pada pengukuran antena, sebuah aspek krusial dalam sistem komunikasi nirkabel. Melalui dukungan riset yang intensif ini, BBPPT telah berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing industri telekomunikasi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengujian dan dukungan penelitian perangkat telekomunikasi, BBPPT telah menjalin kerja sama dengan berbagai universitas ternama di Indonesia, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Melalui kolaborasi ini, BBPPT tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas penelitian di sektor telekomunikasi yang berdampak pada perkembangan teknologi yang lebih inovatif.

Selain itu, BBPPT juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan asosiasi profesional seperti Badan Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Kementerian Kesehatan, serta Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI). Kerja sama ini membuka peluang untuk melakukan penelitian yang relevan dengan perkembangan regulasi dan standar perangkat telekomunikasi yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Sebagian besar riset yang dilakukan oleh BBPPT berfokus pada pengukuran antena, sebuah aspek krusial dalam sistem komunikasi nirkabel. Melalui dukungan riset yang intensif ini, BBPPT telah berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing industri telekomunikasi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Intangible profit yang dihasilkan, apabila dicatatkan dengan nilai rupiah, BBPPT telah membantu lebih kurang sebesar 100 Juta rupiah untuk dukungan riset dalam negeri.

Dengan dukungan riset yang terus dilakukan, BBPPT siap untuk terus berperan dalam meningkatkan ekosistem telekomunikasi Indonesia, mengoptimalkan potensi teknologi, dan menciptakan inovasi yang dapat membawa kemajuan bagi seluruh sektor masyarakat.



C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, realisasi anggaran Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) telah dilakukan dengan efektif dan efisien yang berfokus untuk mendukung pencapaian tujuan strategis instansi. Berikut merupakan rincian realisasi anggaran BBPPT tahun 2024 berdasarkan jenis belanja:

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pegawai	Rp. 12,408,961,000	Rp. 12,317,636,488	99,26%
Belanja Barang	Rp. 60,903,787,000	Rp. 59,031,938,219	96,93%
Belanja Modal	Rp. 2,751,218,000	Rp. 2,737,394,900	99,50%
Grand Total	Rp. 76,063,966,000	Rp. 74,086,969,607	97,40%

Pengalokasian anggaran pada masing-masing jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengembangan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat infrastruktur dan kapasitas pengujian.







Bab IV Penutup

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai lembaga pengujian perangkat telekomunikasi yang dimiliki pemerintah khususnya dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berkembang mengikuti arah kebijakan dan perkembangan teknologi TIK, disamping itu BBPPT turut mendukung kebijakan Transformasi Digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo berprinsip “connecting the unconnected band leaving no-one behind” serta kemandirian dan kedaulatan digital. Dengan adanya kebijakan tersebut mau tidak mau masyarakat Indonesia akan mengikuti perkembangan teknologi, pengguna perangkat TIK akan semakin meningkat banyak dan semakin meningkat jenisnya, disinilah peran BBPPT sebagai lembaga laboratorium di bawah unit Ditjen SDPPI memfilter perangkat yang memang layak di pasarkan di Indonesia demi menjaga dan melindungi konsumen pengguna perangkat telekomunikasi sehingga dapat digunakan dengan aman. Ke depannya BBPPT akan menjadi pusat pengujian perangkat TIK bagi semua produsen baik di dalam negeri, produk luar negeri yang diimpor wajib bersertifikasi dengan standar mutu internasional yang telah ditetapkan sesuai ISO 17025 dan sesuai pemenuhan regulasi teknis yang berlaku di Indonesia.

Pentingnya peningkatan SDM yang berkualitas serta fasilitas pemenuhan laboratorium full compliance dibutuhkan untuk mendukung perkembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, perkembangan akan terus dinamis mengikuti perkembangan teknologi di dunia.

Dukungan BBPPT terhadap kebijakan Transformasi Digital tersebut, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja khususnya pada industri-industri lokal perangkat telekomunikasi. Demikian Laporan Kinerja ini dibuat, diharapkan kinerja BBPPT dalam tahun ke tahun dapat terus meningkat dan terus berinovasi dan selalu terbuka terhadap perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi